



**KEMENTERIAN PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA**



**PERIODE 04 AGUSTUS 2023**



Title	Gerakan Pro-Organik
Date	4 Agustus 2023
Media	Koran Jakarta
Page	6
Author	Koran Jakarta




## » Gerakan Pro-Organik



ANTARA/HO/DISKOMINFO POLEWALI MANDAR

» Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat menggelar Temu hari lapang atau farmer field day, Kamis (3/8). Pemda Polewali Mandar mendorong para petani setempat menerapkan program Genta Organik merupakan suatu gerakan pertanian pro-organik yang meliputi pemanfaatan pupuk organik, pupuk hayati dan pembenah tanah sebagai solusi terhadap masalah pupuk mahal.

Title	Kebijakan Pupuk Bersubsidi Masih Bermasalah	 Kementerian Pertanian
Date	4 Agustus 2023	
Media	Koran Jakarta	
Page	5	
Author	Ant/E-10	

## Kajian Ombudsman

# Kebijakan Pupuk Bersubsidi Masih Bermasalah

BOGOR - Ombudsman RI menemukan sejumlah permasalahan dalam kebijakan program pupuk bersubsidi yang melibatkan Kementerian Pertanian (Kementan) dan PT Pupuk Indonesia. Permasalahan pokok dalam kebijakan pupuk bersubsidi berdasarkan hasil kajian dan investigasi.

Ombudsman RI mencatat lima poin permasalahan pokok dalam kebijakan program pupuk bersubsidi. Pertama, yaitu mengenai tujuan kebijakan pupuk bersubsidi yang dinilai belum jelas dan tepat tujuan. Kedua, permasalahan kriteria petani penerima pupuk bersubsidi yang dinilai belum jelas dan tepat sasaran. Ketiga, pendataan yang tidak kunjung menghadirkan data yang akurat.

Keempat, permasalahan penyaluran yang kerap memunculkan isu tidak tepat sasaran, kurang dan langka. Kelima, permasalahan desain perencanaan anggaran yang tidak merata pada setiap dukungan program pupuk bersubsidi.

Wakil Ketua Ombudsman RI Bobby Hamzar Rafinus mengatakan, Ombudsman RI memberikan perhatian secara khusus guna mendorong perbaikan dan transformasi dalam kebijakan pupuk bersubsidi, salah satunya melalui workshop bertema "Transformasi Kebijakan Pupuk Bersubsidi" yang digelar

di Babakanmadang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Kamis (3/8).

"Hal ini dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan pemerintah terhadap publik di sektor pertanian," kata Bobby saat memberikan sambutan dalam workshop itu.


Menurut dia, kegiatan workshop itu akan menjadi momentum yang penting bagi instansi-instansi yang terlibat untuk mendorong perbaikan dan transformasi kebijakan pupuk bersubsidi. "Tentunya menjadi harapan bagi kita semua, semoga tata kelola pupuk bersubsidi semakin lebih baik ke depannya dan petani kecil di Indonesia mendapat perlindungan atas hak-haknya dalam memperoleh pupuk bersubsidi," ujarnya.

### Perbaiki Kebijakan

Pada kesempatan sama, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo optimistis workshop yang digelar bersama Ombudsman dan PT Pupuk Indonesia dapat memperbaiki implementasi kebijakan pupuk bersubsidi menjadi lebih baik, cepat dan akurat. Dia mengingatkan, tidak semua petani berhak memperoleh pupuk bersubsidi, melainkan ada kriteria dan sejumlah persyaratan tertentu.

"Ini tentu kita berharap menemukan sistem yang lebih akurat," ujar dia lagi.

■ Ant/E-10

Title	Pemerintah Tidak Serius, Kelaparan Terjadi Lagi di Papua	 Kementerian Pertanian
Date	4 Agustus 2023	
Media	Koran Jakarta	
Page	1	
Author	Ers/SB/YK/rup/E-9	

Ketahanan Pangan | Pemenuhan Pangan Sudah Terlalu Lama Bergantung pada Impor

# Pemerintah Tidak Serius, Kelaparan Terjadi Lagi di Papua

- » Pilar pemerataan (distribusi) dan utility dalam ketahanan pangan belum terpenuhi, sehingga klaim soal pemerataan terkesan semu.
- » Pemerintah harus menetapkan salah satu wilayah *food estate* di Papua supaya tidak terjadi kelaparan ke depan.

JAKARTA – Menjelang peringatan Hari Ulang Tahun ke-78 RI, 17 Agustus 2023 mendatang, publik dikagetkan dengan munculnya berita kelaparan yang menimpa sekitar 10 ribu warga di Kabupaten Puncak, Papua Tengah. Menurut laporan sedikitnya enam orang meninggal dunia.

Kalau melihat kembali setahun yang lalu, bencana kelaparan juga melanda wilayah Lanny Jaya, Papua, yang mengakibatkan empat orang warga meninggal. Kelaparan yang menimpa warga di wilayah Papua itu karena gagal panen akibat kekeringan.

Ini berarti, hampir setiap tahun, tepatnya tiap Agustus, wilayah tertentu di Papua dilanda kelaparan. Pemerintah pusat maupun pemerintah daerah (pemda), belum membuat program untuk mengatasi bencana tersebut. Pemerintah terlihat tidak serius menangani masalah pangan di Papua.

Pakar Pertanian Institut Pertanian Bogor (IPB), Dwi Andreas Santosa, yang diminta pendapatnya, mengatakan peristiwa kelaparan di Papua sangatlah anomali, sebab kekayaan alamnya melimpah, tetapi justru tertimpa kelaparan.

Di peta kerawanan pangan, ketahanan pangan di hampir semua wilayah di Papua, kata Dwi, masuk zona merah.

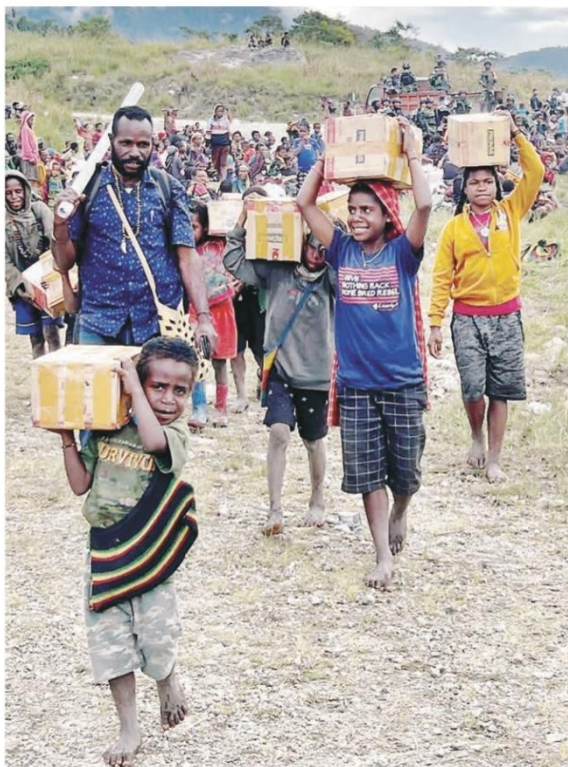
"Mestinya, kekayaan alam itu linear dengan tingkat kesejahteraan dan stok pangan di wilayah tersebut. Namun, faktanya tidak begitu dengan yang terjadi di Papua," jelas Dwi.

Dia pun meminta pemerintah agar mengambil langkah cepat menghadapi masalah kelaparan di Papua.

Menurut Dwi, ada dua pendekatan yang bisa ditempuh. Pertama, mengirim secepatnya bantuan pangan pokok ke sana, meskipun terkendala dengan medannya yang berat, tetapi apa pun masalahnya pemerintah harus lakukan. "Harus kirim secepatnya bantuan ke sana. Gunakan segala daya upaya, apa pun rintangannya, harus diatasi, termasuk apabila ada ancaman OPM," tegasnya.

Pendekatan kedua, lanjut Dwi, pemerintah harus membuat program jangka panjang dengan cara mendorong diversifikasi pangan kembali ke pangan lokal.

"Dulu, Papua itu konsumsinya pangan lokal, tetapi semenjak ada program raskin (beras miskin) pada era Orde Baru, mereka beralih ke beras,



**BANTUAN UNTUK WARGA PUNCAK JAYA** | Masyarakat yang mengalami kelaparan akibat terdampak kekeringan di Distrik Agandugume dan Lambewi Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah memperoleh bantuan logistik dari pemerintah melalui Kementerian Sosial, belum lama ini.

dan sekarang kian berkembang ke produk-produk berbahan baku terigu atau gandum," katanya.

Diakui memang, tidaklah mudah untuk mengubah pola makan, misalnya dari saat ini biasa konsumsi beras, lalu beralih ke konsumsi pangan lokal lainnya. Tetapi jika diseriusi, bakal bisa terwujud.

Asalkan, dari produksi hingga pascapanennya perlu ada sentuhan teknologi. Sejak pembibitannya harus menggunakan teknologi unggul serta menggunakan teknologi cocok tanam. Kemudian, perlunya juga teknologi pascapanen serta fasilitas pendingin agar tidak mudah rusak. "Jika menggunakan metode itu, pasti pengembangan pangan lokal tak akan menemui kendala," kata Dwi.

## Belum Terpenuhi

Dihubungi pada kesempatan lain, pakar pertanian dari Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Jawa Timur,

Surabaya, Ramdan Hidayat, mengatakan meskipun sudah ada perbaikan dalam pemenuhan kebutuhan pangan dari dalam negeri, namun kelaparan yang melanda sebagian wilayah seperti Papua, menunjukkan empat pilar ketahanan pangan belum sepenuhnya terpenuhi.

"Dari empat pilar, yaitu ketersediaan, keterjangkauan, distribusi, dan *utility* ada yang belum terpenuhi, yaitu masalah pemerataan dan *utility* yang belum tercapai. Bisa dikatakan, klaim soal pemerataan ini semu. Ini disebabkan pemenuhan pangan kita terlalu lama bergantung dengan impor," kata Ramdan.

Sebenarnya untuk antisipasi El Nino, pemerintah sudah mempersiapkan impor dua juta ton beras, tapi baru tahap awal 500 ribu ton yang terdistribusi.

"Sebagai negara kepulauan, memang ada gap tersendiri dalam upaya distribusi. Seharusnya Badan Pangan diberi kewenangan lebih untuk mengatasi ini,

dengan mengoordinasikan Kementerian Pertanian dan Perdagangan," katanya.

Wilayah Merauke, tambah Ramdan, sebenarnya sangat potensial untuk program "Food Estate" (Lumbung Pangan) padi, hanya saja infrastrukturnya belum mendukung. Pemerintah harus mendorong "Food Estate" tersebut ke depan supaya tidak terjadi lagi kelaparan di Bumi Cendrawasih.

Sementara itu, Asisten Deputi Utusan Khusus Presiden (UKP), Achmad Yakub, mengatakan distribusi Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) di wilayah Papua harus dievaluasi, karena 12.849 ton yang dipasok ke sana belum mampu mengatasi krisis kelaparan.

Aspek yang perlu dipertimbangkan adalah penyediaan CPP harus sesuai dengan kebutuhan lokal, seperti pemanfaatan umbi-umbian yang ada di wilayah tersebut. Sinergi yang kuat antara berbagai kementerian dan lembaga (K/L) juga diperlukan untuk mengatasi situasi darurat tersebut.

"Bantuan pangan, obat-obatan, dan pakaian merupakan langkah awal yang penting dalam jangka pendek. Sedangkan upaya jangka menengah dan panjang adalah mengambil tindakan yang memastikan situasi seperti ini tidak terulang di masa depan," katanya.

Salah satu langkah penting adalah memperkuat budaya lumbung pangan masyarakat, di mana setiap anggota masyarakat turut berkontribusi dalam upaya menjaga ketersediaan pangan. Upaya mitigasi perubahan iklim juga menjadi aspek yang sangat krusial, melalui riset dan pengembangan tanaman pangan yang dapat tumbuh dengan baik dalam kondisi cuaca ekstrem, baik itu dingin maupun panas.

## Penyaluran Bantuan

Berkaitan dengan kondisi tanggap darurat, Menteri Sosial (Mensos), Tri Rismaharini, mengatakan sebanyak total 25 ton bantuan disalurkan untuk masyarakat terdampak kekeringan di Distrik Agandugume dan Distrik Lambewi, Kabupaten Puncak, Papua Tengah. Bantuan tersebut merupakan akumulasi dari bantuan Kemensos 15,1 ton, Panglima TNI 8 ton, PT Freeport lebih dari 2 ton.

"Penanganan bencana secara bersama dengan berbagai pihak. Kami tidak bisa sendiri, kami dibantu TNI, para rohaniawan di daerah sana," kata Mensos, di Jakarta, Kamis (3/8).


Dia memastikan penyaluran berlangsung aman dan kondusif. Meskipun ada kekhawatiran soal risiko keamanan, tapi komunikasi dengan tokoh agama terus dijalin agar penyaluran dapat segera dilaksanakan.

"Saya sampaikan kita harus cepat, mengingat warga sudah kondisi kelaparan dan musim dingin lagi. Saya menyampaikan itu kami dibantu oleh TNI untuk percepatannya," tegas Risma.

■ **ers/SB/YK/rup/E-9**

Dokumentasi

**BIRO HUMAS DAN INFORMASI PUBLIK KEMENTERAN**

Title	Retno Rakyat Harus Jadi Pusat Pekerjaan Pemerintahan Negara-negara Asean	 Kementerian Pertanian
Date	4 Agustus 2023	
Media	Koran Jakarta	
Page	11	
Author	Ant/I-1	

# Retno: Rakyat Harus Jadi Pusat Pekerjaan Pemerintahan Negara-negara Asean

**M**enteri Luar Negeri Indonesia, Retno LP Marsudi, menegaskan bahwa rakyat harus menjadi pusat dari pekerjaan yang dilakukan semua pemerintah negara anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (Asean).

Semangat itulah, menurut dia, yang ingin diprioritaskan Indonesia selama kepemimpinannya tahun ini yaitu untuk menjaga peran Asean sebagai lokomotif perdamaian dan stabilitas serta mewujudkan *Asean Matters*, yang berarti masyarakat bisa menikmati hidup dalam lingkungan yang damai.

"Indonesia juga ingin mempertahankan Asia tenggara sebagai *epicentrum of growth*, dimana rakyat bisa menikmati kemakmuran," kata Menlu Retno seperti dikutip dari transkrip sambutannya dalam Pertemuan Para Gubernur dan Wali Kota se-Asean di Jakarta, Selasa (1/8).

Guna mewujudkan tema keketuaan Indonesia tersebut, Menlu Retno memaparkan tiga agenda utama yang harus diupayakan yaitu ketahanan kesehatan, ketahanan pangan, dan transisi



KEMLU.GO.ID


energi.

Dalam hal ini, Indonesia memfokuskan pekerjaannya di Asean untuk memperkuat kerja sama kesehatan termasuk melalui *One Health Initiative* dan *Asean Response Fund*. Sementara terkait ketahanan pangan, Menlu Retno menyinggung tentang perang di Ukraina yang telah menyebabkan kelangkaan pangan dan kenaikan harga kebutuhan pokok, selain dunia juga menghadapi banyak masalah terkait pangan dari gagal panen yang terhambat akibat perubahan iklim dan tingginya tingkat kelaparan.

Memperhatikan tantangan-tantangan tersebut, Menlu Retno memastikan

bahwa kepemimpinan Indonesia akan memprakarsai inisiatif yang akan membangun mekanisme regional untuk memperkuat ketahanan pangan, rantai pasokan regional, dan pertanian berkelanjutan.

Terakhir mengenai transisi energi, dia mengatakan bahwa ekonomi hijau merupakan masa depan Asia tenggara. Indonesia telah menetapkan target yang ambisius yaitu target bauran energi 23 persen dari energi terbarukan pada 2025, dan emisi nol bersih pada 2060. Asean pun berkomitmen untuk mencapai target energi terbarukan sebesar 23 persen dalam pasokan energi pada 2025. ■ Ant/I-1

Title	Thailand Naikkan Suku Bunga ke Level Tertinggi sejak 2014	 Kementerian Pertanian
Date	4 Agustus 2023	
Media	Koran Jakarta	
Page	12	
Author	SB/BoT/N-3	

## Stabilitas Moneter

# Thailand Naikkan Suku Bunga ke Level Tertinggi sejak 2014

BANGKOK - Bank sentral Thailand, Rabu (2/8), menaikkan suku bunga kebijakan utamanya ke level tertinggi dalam sembilan tahun terakhir, sejak 2014 untuk mengendalikan inflasi dan mempertahankan fleksibilitas kebijakan di tengah prospek ekonomi yang tidak menentu.

Komite kebijakan moneter Bank of Thailand (BOT) dengan suara bulat memilih untuk menaikkan suku bunga kebijakan dari 2,00 persen menjadi 2,25 persen sehingga membawa suku bunga kebijakan utama ke level tertingginya sejak awal tahun 2014.

Seperti dikutip dari *Antara*, BOT menyampaikan dalam sebuah pernyataan meski perekonomian Thailand sedang menunjukkan tanda-tanda peningkatan berkat pariwisata dan konsumsi pribadi, lambatnya pemulihan ekspor dan kekhawatiran politik internal telah meningkatkan risiko terhadap prospek ekonomi.

"Kebijakan moneter harus menjaga inflasi berada pada kisaran target secara berkelanjutan dan mendorong stabilitas keuangan makro jangka panjang, dengan mencegah akumulasi ketidakeimbangan finansial yang berpotensi muncul di lingkungan suku bunga rendah dalam waktu lama," demikian



MANAN VATSYAYANA / AFP

**Warga berada di luar pasar basah di Bangkok, Thailand, beberapa waktu lalu. Bank sentral Thailand, Rabu (2/8), menaikkan suku bunga ke level tertinggi dalam sembilan tahun terakhir**

menurut pernyataan BOT.

"Harga energi lebih rendah, subsidi biaya hidup, dan basis komparatif tinggi dari tahun 2022 berkontribusi terhadap penurunan inflasi Indeks Harga Konsumen, yang diproyeksikan pulih pada paruh kedua tahun 2023," kata Asisten Gubernur BOT, Piti Disyatat.

### Fenomena El Nino

Disyatat mengatakan harga pangan lebih tinggi disertai dengan fenomena El Nino lebih parah dapat memperburuk *cost pass-through*, yakni pengaruh perubahan biaya *input* pada harga *output* perusahaan dalam konteks pertumbuhan ekonomi yang berlangsung.


Ke depan, BOT mempertimbangkan prospek ekonomi, inflasi, serta penilaian risiko terkait dalam membahas kenaikan suku bunga kebijakan lebih lanjut.

*Headline inflation* negara Asia Tenggara itu terus menurun jadi 0,23 persen secara tahunan (yoy) pada Juni atau tingkat terendah dalam 22 bulan dan berada di bawah kisaran target BOT yakni 1-3 persen selama dua bulan berturut-turut.

Dalam situs resmi BOT, Disyatat mengatakan kebijakan kenaikan suku bunga tersebut diperlukan dalam konteks kelanjutan ekspansi ekonomi dan kelonggaran penyempitan. ■ **SB/BoT/N-3**

Dokumentasi

**BIRO HUMAS DAN INFORMASI PUBLIK  
KEMANTAN**

Title	Louis Dreyfus Perluas Bisnis Penghiliran Sawit	 Kementerian Pertanian
Date	4 Agustus 2023	
Media	Bisnis Indonesia	
Page	7	
Author	Lorenzo A Mahardhika	

| PABRIK PEMURNIAN GLISERIN |

## Louis Dreyfus Perluas Bisnis Penghiliran Sawit

Bisnis, BANDAR LAMPUNG — Perusahaan perdagangan global dan pemroses produk pertanian membangun pabrik penyulingan atau *refinery* minyak sawit di Provinsi Lampung, seiring dengan upaya perusahaan memperluas bisnis dari sektor penghiliran komoditas kelapa sawit.

Rajat Dutt, Country Head Louis Dreyfus Company (LDC) Indonesia, menjelaskan pembangunan pabrik itu akan menambah kapasitas penyulingan gliserin serta pengemasan minyak nabati yang sudah ada di pabrik tersebut.

Ekspansi itu merupakan salah satu

upaya perusahaan mendiversifikasi pendapatan melalui produk bernilai tambah (*value added*).

"Indonesia adalah pasar yang sangat penting bagi kami dan kami sudah berinvestasi disini sejak 1999. Seiring dengan strategi perusahaan ke hilir-sasi dan produk nilai tambah, maka kami akan masuk ke peningkatan kapasitas pabrik gliserin," jelasnya saat ditemui di Warehouse PT LDC Indonesia, Rabu (3/8).

Dia menuturkan pembangunan proyek tersebut akan memakan waktu sekitar 18 bulan hingga 24 bulan terhitung dari akhir 2023.

Meski demikian, Dutt enggan me-

nyebutkan nilai investasi yang dikurangkan untuk membangun pabrik tersebut. Dia melanjutkan, proses konstruksi pabrik baru tersebut belum dimulai.

Saat ini, Dutt mengatakan LDC dalam proses mengajukan perizinan pembangunan pabrik kepada otoritas otoritas terkait.

Setelah perizinan didapatkan, perusahaan akan melanjutkan ke pembelian mesin-mesin untuk fasilitas tersebut, pemilihan kontraktor, dan mulai membangun pabrik tersebut.

Dutt mengatakan LDC berupaya memulai proses konstruksi sesegera mungkin.

Dikutip dari siaran resmi perusahaan, pengembangan fasilitas baru LDC di Lampung akan melengkapi kegiatan pemurnian gliserin yang sudah ada di Claypool, Amerika Serikat dan Wittenberg, Jerman.

Pabrik baru itu akan dilengkapi untuk memproduksi gliserin sesuai dengan United States Pharmacopeia (USP) atau panduan standar obat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Amerika Serikat serta menawarkan berbagai pilihan kemasan makanan yang berkualitas.

Rubens Marques, Head of South & Southeast Asia LDC, menuturkan pembangunan pabrik baru tidak ha-


nya memperkuat posisi perusahaan di pasar Indonesia saja.

Namun, dia menyatakan pabrik itu makin memperkuat kapasitas perusahaan untuk memproses, mengemas, dan mendistribusikan produk bernilai tambah yang dapat merespons tren pasar dan konsumen yang berkembang.

"Hal ini termasuk meningkatnya permintaan akan makanan dan bahan nabati yang sehat dengan memanfaatkan rantai pasokan global, jaringan operasional, dan wawasan pasar dari LDC," kata Marques dalam keterangan resmi tersebut. (Lorenzo A Mahardhika)

Dokumentasi

BIRO HUMAS DAN INFORMASI PUBLIK  
KEMANTAN

Title	Bantuan Pangan Ampuh Rem Inflasi & Sejahterakan Petani	 Kementerian Pertanian
Date	4 Agustus 2023	
Media	Rakyat Merdeka	
Page	9	
Author	IMA	

Pacu Kegiatan Ekonomi

# Bantuan Pangan Ampuh Rem Inflasi & Sejahterakan Petani

**Program Bantuan Pangan memberikan banyak dampak positif terhadap perekonomian. Antara lain, mengurangi beban ekonomi masyarakat tidak mampu.**

PROGRAM Bantuan Pangan dilaksanakan Perum Badan Urusan Logistik (Bulog), Kepala Divisi Perencanaan Operasional dan Pelayanan Publik Bulog Epi Sulandri mengatakan, pihaknya mendapatkan penugasan untuk menyalurkan Bantuan Pangan kepada 21,353 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang masing-masing mendapat 10 kilogram (kg) beras.

Tahun ini, papar Epi, penyaluran Bantuan Pangan tahap 1 sudah dilakukan pada periode April, Mei, Juni. Lalu, pihaknya kembali mendapatkan penugasan untuk tahap 2 yaitu periode Oktober-Desember mendatang.

“Untuk realisasi bantuan pangan ini (tahap 1), sudah 640.590 ton, atau 100 persen dari pagu total,” ujar Epi, dalam Webinar Pataka 79, yang digelar secara daring (dalam jaringan), Rabu (2/8).

Epi menuturkan, masih ada sejumlah tantangan yang dihadapi Bulog dalam menyalurkan bantuan tersebut. Di antaranya terkait akses untuk menjangkau suatu daerah atau kondisi geografis, masalah ketidaktepatan waktu angkutan seperti transportasi laut, hingga adanya ketidaksesuaian alamat karena pemekaran wilayah.

“Sistem penyaluran bantuan saat ini *by name by address*, tapi

ternyata ada penerima manfaat, yang sudah pindah, sehingga dilakukan penelusuran lebih jauh,” kata Epi.

Meski demikian, menurut Epi, Pemerintah sudah menyepakati akan memperpanjang program Bantuan Pangan beras untuk periode Oktober-Desember 2023.

Pasalnya, lewat program ini terdapat dampak positif seperti meringankan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pangan. Selain itu, tercipta stabilitas harga beras, baik di pasar umum maupun di petani. Serta mampu menekan inflasi.

Mengutip data Badan Pusat Statistik (BPS), Bulog mencatat rata-rata perubahan harga beras eceran pada periode Juli-Oktober 2022 sebesar 1,12 persen.

Lalu pada empat bulan berikutnya, yakni November dan Desember 2022 hingga Januari dan Maret 2023 terdapat rata-rata perubahan sebesar 1,67 persen.

Sementara pada periode Maret-Juli 2023, yang merupakan periode penyaluran Bantuan Pangan, meski harga beras eceran mengalami sedikit kenaikan dibandingkan 2022, namun terdapat kestabilan harga yang turut mengendalikan inflasi.

Dengan adanya program ini, lanjut Epi, telah mampu menekan laju rata-rata kenaikan harga beras di pasar umum di



**Arief Prasetyo Adi**

April-Juni menjadi 0,4 persen. Hal ini turut berdampak pada terkendalinya inflasi beras dan inflasi nasional.

“Kalau dibandingkan dengan kenaikan harga antar bulan, ketika kami jalankan program Bantuan Pangan selama 4 bulan, itu yang paling rendah kenaikan harganya dibandingkan periode 4 bulan sebelumnya,” beber Epi.

Di samping itu, dampak lain dari Bantuan Pangan di antaranya terciptanya sarana hilirisasi produksi beras dalam negeri, menumbuhkan ekonomi dan kesejahteraan petani.

Hingga meningkatkan produksi petani, serta mendukung penyerapan gabah beras petani dalam negeri untuk CBP (Cadangan Beras Pemerintah).

Dan begitu ketika ada penugasan rutin yang diberikan Pemerintah, lanjut Epi, pihaknya bisa merencanakan strategi penyerapan beras.

“Atau hasil panen dalam negeri

menjadi lebih mudah, hingga penyalurannya ke gudang dan sampai ke masyarakat,” ucapnya.

Pengamat Pertanian dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI), Khudori menekankan, seluruh wilayah Indonesia bergantung dengan konsumsi beras.

Karenanya tak heran bila konsumsi beras ini menyedot anggaran belanja rumah tangga paling besar.

“Jika melihat, pangsa beras dalam konsumsi energi sebesar 58 persen, sedangkan dari sisi pangsa protein sebesar 43 persen.

“Ketika harga beras naik sedikit, maka masyarakat yang berada di garis kemiskinan akan terganggu. Apalagi usaha tani padi melibatkan 13 juta rumah tangga. Makanya, Pemerintah tidak akan main-main dengan komoditas beras,” jelasnya.

“Jika pun melihat, dari data inflasi pangan dalam kurun waktu 9 tahun terakhir, beras bukan menjadi penyumbang inflasi yang utama.

Artinya, kata dia, Pemerintah mampu menstabilkan harga beras di pasar. Meskipun sejak Agustus tahun lalu, harga beras naik dan disikapi Pemerintah dengan melakukan Operasi Pasar (OP) besar-besaran.

“Tapi di situasi itu, KPM terlindung dari kenaikan harga beras karena ada Bantuan Pangan,” katanya.

“Jika berharap, untuk menjaga stabilitas harga beras ke depannya, Bulog mampu menyerap

beras dengan jumlah besar.

Apalagi tahun ini Badan Pangan Nasional (Bapanas) menargetkan, penyerapan CBP mencapai 2,4 juta ton, di mana stok di akhir tahun ada sekitar 1,2 juta ton.

“Kalau bisa menyerap dalam jumlah banyak, maka inflasinya terkendali, bahkan rendah. Saya kira penugasan penyaluran Bantuan Pangan sebanyak dua kali (dalam setahun) itu, cukup,” tukasnya.

Terpisah, Kepala Badan Pangan Nasional atau National Food Agency (NFA) Arief Prasetyo Adi memastikan, sebanyak 1,3 juta ton stok Bulog *secured* per tanggal 2 Agustus 2023.

Hal ini disampaikannya usai menghadiri rapat internal yang dipimpin Presiden Jokowi, di Istana Merdeka, pada Rabu (2/8).


Arief melaporkan, Bulog telah menyalurkan beras lebih dari 1,34 juta ton untuk stabilisasi pasokan dan harga pangan, serta Bantuan Pangan untuk masyarakat berpendapatan rendah.

“Pemberian bantuan beras ini, sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat berpendapatan rendah,” ungkapnya.

Untuk diketahui, berdasarkan data BPS, inflasi Juli 2023 menunjukkan bahwa tren inflasi tahunan mengalami penurunan sejak Februari hingga Juli 2023 secara berurutan dari 5,47 persen, 4,97 persen, 4,33 persen, 4,00 persen, 3,52 persen dan 3,08 persen (yoy). ■ IMA

Dokumentasi

BIRO HUMAS DAN INFORMASI PUBLIK  
KEMANTAN

Title	Kelaparan Di Papua Dan Potensi 9 Masalah Kesehatan Akibat El Nino	 Kementerian Pertanian
Date	4 Agustus 2023	
Media	Rakyat Merdeka	
Page	8	
Author	Rakyat Merdeka	

## Kelaparan Di Papua Dan Potensi 9 Masalah Kesehatan Akibat El Nino



**Oleh: Prof Tjandra Yoga Aditama**  
 Direktur Pasca Sarjana Universitas YARSI / Guru Besar FKUI  
 Mantan Direktur Penyakit Menular WHO Asia Tenggara  
 Mantan Dirjen Pengendalian Penyakit serta Kepala Balitbangkes  
 Penerima rakyat Merdeka Award 2022 bidang Edukasi dan Literasi Kesehatan Masyarakat

MEMBACA berita halaman pertama *Rakyat Merdeka* 1 Agustus 2023 yang berjudul "Papua, Tolong... Tolong... Tolong...". Kita patut merasa amat sedih. Dalam berita tersebut ditulis, ada ribuan warga distrik Agandugume dan distrik Lambewi, Papua Tengah, kelaparan. Enam di antaranya, meninggal.

Ada lima hal yang perlu mendapat perhatian. Pertama, kemungkinan gangguan penyediaan makanan dan atau kelaparan akibat El Nino seharusnya sudah diantisipasi sejak awal. Hal ini sudah dibahas pada tulisan saya pada *Rakyat Merdeka* 22 Juli 2023. Saat itu saya memli, akibat El Nino, bisa saja terjadi gang-

guan kekurangan makanan sampai ke malnutrisi.

Sebab, ada gangguan ketersediaan ketahanan pangan (*food security*). Food Agricultural Organization (FAO) juga sudah mengingatkan negara-negara untuk melakukan risiko mitigasi dan intervensi dalam menghadapi kemungkinan kurangnya pasokan makanan ini. Antara lain, dengan menyiapkan cadangan makanan strategis.

Kedua, dalam tulisan di *Rakyat Merdeka* 22 Juli itu saya juga memaparkan 10 dampak El Nino bagi kesehatan.

Artinya, selain bahaya kelaparan yang sudah terlanjur terjadi, kita perlu mengantisipasi sembilan bahaya kesehatan lainnya.

Kesembilannya, yaitu peningkatan penyakit menular, peningkatan *water borne disease*,

penurunan akses ke fasilitas pelayanan kesehatan, dan peningkatan penyakit paru dan saluran napas.

Lalu, gangguan kesehatan akibat *heat stress*, dampak psikososial dan kejiwaan, peningkatan penyakit tular vektor, kemungkinan bencana alam dan, serta dampak langsung akibat kecederaan sampai kemungkinan kematian.

Tentu kita berharap pemerintah mengambil langkah antisipatif yang tepat untuk kesembilan masalah kesehatan tersebut, di masa El Nino yang masih akan berlangsung di beberapa waktu ke depan.

World Meteorological Organization (WMO) menyatakan, ada sekitar 90 persen probabilitas bahwa El Nino sekarang akan terus berlanjut sampai akhir tahun ini dengan derajat sedang, atau bahkan lebih tinggi lagi.

Ketiga, pada Juni 2023 yang lalu Direktur Jenderal WHO juga sudah menyatakan bahwa dengan kejadian El Nino sekarang ini, WHO bersiap menghadapi kemungkinan peningkatan penularan penyakit akibat virus, seperti *dengue*, *zika* dan *chikungunya*.

WHO mewanti-wanti tentang perubahan cuaca akibat El Nino akan mempengaruhi pola hidup nyamuk.

Berbagai jenis nyamuk amat berpengaruh pada penularan banyak sekali penyakit menular, di dunia dan juga di negeri kita.

Keempat, fenomena El Nino dapat meningkatkan temperatur dunia sekitar 0,2 derajat.

Menurut US National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), artinya mungkin akan mencapai 1,5 derajat Celsius yang

merupakan *global warming limit*, yang memang kemungkinan dicapainya masih sekitar 50 persen.

Khusus bagi negara kita, WMO menyatakan, El Nino akan mungkin dapat menyebabkan kekeringan hebat, bahwa yang mereka gunakan adalah *severe droughts*, di Australia, Indonesia, dan sebagian Asia Selatan.

Data lain menyebutkan, Indonesia dan Australia mungkin akan menghadapi musim panas yang lebih panjang dan kemungkinan ada kebakaran hutan, yang tentu juga perlu kita antisipasi.

Apalagi, kita punya pengalaman beberapa kali menghadapi kebakaran hutan dengan segala dampaknya yang kompleks.

Kelima, semua hal di atas ini jelas menunjukkan bahwa pemerintah dengan dukungan kita semua perlu secara langsung dan

cepat mengatasi masalah yang sudah kini sudah terjadi, serta mempersiapkan diri lebih baik lagi.

Ini sejalan dengan pernyataan WMO yang mengharuskan pemerintah berbagai negara mengambil langkah adekuat untuk mencegah hilangnya nyawa manusia.


WMO juga menyebut, pernyatannya merupakan petanda (*signal*) agar pemerintah negara-negara di dunia memobilisasi persiapan dalam mengantisipasi El Nino ini.

Tentu kita berharap pemerintah kita juga mengambil langkah-langkah secara terpadu dan menyeluruh dalam menghadapi bahaya El Nino ini.

Apalagi, sudah terlanjur terjadi masalah seperti di Papua Tengah yang amat menyedihkan sekarang ini. ■

Dokumentasi

BIRO HUMAS DAN INFORMASI PUBLIK  
KEMANTAN

Title	Masalah Papua, Masalah Kita Juga	 Kementerian Pertanian
Date	4 Agustus 2023	
Media	Rakyat Merdeka	
Page	8	
Author	KAL	

Kekeringan Dan Kelaparan

## Masalah Papua, Masalah Kita Juga

KETUA DPR Puan Maharani menyoroti bencana kelaparan yang terjadi di Kabupaten Puncak, Papua Tengah. Pemerintah diminta menyiapkan solusi jangka panjang guna mengatasi peristiwa kekeringan dan kelaparan yang terjadi hampir setiap tahun.

“Kita tidak boleh melupakan saudara kita di Papua. Gotong royong dari seluruh pihak diperlukan untuk membantu saudara-saudara kita yang saat ini menghadapi bencana kelaparan, dampak dari cuaca ekstrem,” kata Puan, kemarin.

Diketahui, bencana kelaparan di Papua Tengah disebabkan kemarau panjang yang dibarengi dengan cuaca dingin ekstrem, hingga membuat daerah tersebut mengalami kekeringan. Berada di belakang pegunungan Carstensz, Kabupaten Puncak, kerap mengalami kekeringan saat musim kemarau.

Akibat kelaparan kali ini,

7.500 warga terdampak, khususnya yang berada di Distrik Agandugume dan Distrik Lambewi. Masyarakat di dua distrik itu akhirnya mengungsi ke distrik-distrik terdekat yang kondisinya sedikit lebih baik.

Suhu rendah di Kabupaten Puncak akibat kemarau panjang menyebabkan kekeringan, sehingga tanaman seperti umbi-umbian tidak bisa tumbuh.

Padahal, umbi-umbian merupakan makanan pokok masyarakat setempat, sehingga saat gagal panen, mereka kesulitan memenuhi kebutuhan pangan.

Sebab itu, Puan meminta Pemerintah Indonesia melakukan langkah terpadu menghadapi bencana kelaparan yang rutin terjadi di wilayah tersebut. Apalagi ini bukan bencana kelaparan pertama di Papua. Pada tahun 1982, ratusan warga Jayawijaya, Kabupaten Puncak Jaya, juga mengalami hal yang sama.

Lalu, pada 1984 dan 1986, kelaparan kembali berulang dengan jumlah kematian yang juga tak sedikit.

Selain kejadian di tahun ini, bencana terkini terjadi pada 2022, saat empat orang di Lanny Jaya meninggal akibat kelaparan. Di Kabupaten Puncak, bencana kelaparan hampir setiap tahunnya terjadi.

Menurut Puan, penyelesaian persoalan kelaparan di daerah pegunungan di Papua ini harus dilakukan secara komprehensif.

“Tidak cukup sekadar memberi bantuan. Tapi juga antisipasi agar ke depannya kelaparan bisa dihindari. Solusi harus dihadirkan secara terpadu,” ujarnya.

Penyelesaian kelaparan di Papua secara terpadu juga diperlukan, mengingat medan geografis yang sulit menyebabkan bantuan susah sampai. Akses yang paling mudah dan cepat dengan menggunakan pesawat.

“Tapi persoalannya sekarang, medan dan kondisi keamanan di sana menyebabkan sulitnya distribusi bantuan. Harus ada intervensi khusus, sehingga masyarakat segera mendapat bantuan,” kata Puan.

Puan mendukung upaya pengamanan dari TNI/Polri dalam penyaluran bantuan ke warga Papua Tengah. Sebab, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan adanya gangguan keamanan dari Organisasi Papua Merdeka (OPM) saat tim menuju lokasi pengungsian warga untuk memberi bantuan.

Puan menyebut, dukungan dari TNI/Polri bisa membantu penyaluran logistik yang tertahan.

Sebagai pilar penjaga keamanan di Papua, TNI/Polri harus menjamin keamanan saat pasokan bantuan tiba di Papua.

“Upayakan agar bantuan untuk warga segera sampai dan

antisipasi adanya masalah saat proses pendistribusiannya, serta pastikan masyarakat aman saat menerima bantuan,” imbaunya.


Berdasarkan laporan yang diterima, terdapat 6 warga di Distrik Agandugume dan Distrik Lambewi di Kabupaten Puncak, Papua Tengah, meninggal dunia di tengah kemarau panjang tahun ini. 5 korban meninggal merupakan orang dewasa dan 1 orang bayi berusia 6 bulan.

Dia mendukung upaya Pemerintah yang saat ini tengah bekerja masif dengan penetapan tambahan masa tanggap darurat bencana kekeringan di Papua Tengah menjadi dua minggu.

“Ini pekerjaan rumah yang sangat besar. Pemerintah dengan dukungan seluruh elemen bangsa harus bisa mengatasi persoalan kelaparan di Papua. Tentunya DPR akan memberi dukungan lewat fungsi dan kewenangan kami,” ucapnya. ■KAL

Dokumentasi

BIRO HUMAS DAN INFORMASI PUBLIK  
KEMANTAN


Title	Ekspor Kubis Sumut Ke Taiwan Melonjak	 Kementerian Pertanian
Date	4 Agustus 2023	
Media	Rakyat Merdeka	
Page	10	
Author	Rakyat Merdeka	

# Ekspor Kubis Sumut Ke Taiwan Melonjak

EKSPOR kubis atau kol asal Sumatera Utara (Sumut) selama semester I-2023 melonjak hingga 20,21 persen dibanding periode yang sama tahun 2022.

Jumlah ekspor kol Sumut ini mencapai Rp 36,69 miliar. Sementara di periode yang sama tahun lalu hanya Rp 30,52 miliar.

Kol Sumut ini sangat diminati oleh masyarakat Taiwan sebagai negara tujuan ekspor utama. Frekuensi pengiriman ke Taiwan mencapai 5-10 kontainer per minggu.

Title	Pemerintah Bersinergi Kelola Sampah Makanan	 Kementerian Pertanian
Date	4 Agustus 2023	
Media	Investor Daily	
Page	12	
Author	Tri Listiyarini	

# Pemerintah Bersinergi Kelola Sampah Makanan

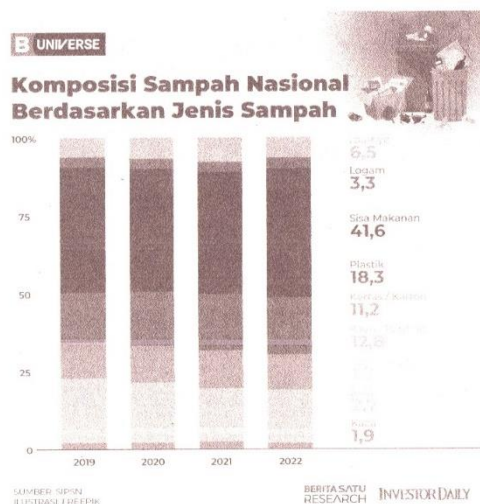
**JAKARTA, ID**—Badan Pangan Nasional/National Food Agency (Bapanas/NFA) terus mendorong sinergi kementerian/lembaga (K/L) untuk mengelola sampah makanan di Tanah Air. Hal itu mengingat masih besarnya produksi jenis sampah tersebut. Studi Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menyebutkan, pada 2000-2019, Indonesia menghasilkan 23-48 juta ton sampah makanan per tahun, jumlah itu sepatutnya bisa menghidupi 61-125 juta orang atau setara 29-47% populasi rakyat RI.

Oleh Tri Listiyarini

**M**enurut Deputy II Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi Bapanas Nyoto Suwignyo, permasalahan tata kelola sampah makanan tengah menjadi topik global saat ini. Pemerintah Indonesia pun terus memberi perhatian serius dan menempatkan isu itu dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024. Apalagi, Indonesia tercatat berada pada peringkat ketiga penghasil sampah makanan terbesar di dunia, setelah Amerika Serikat dan Arab Saudi. “Bapanas mendukung sinergi K/L untuk menata kelola sampah makanan, di antaranya yang Bapanas lakukan adalah menancangkan Gerakan Selamatkan Pangan (GSP),” ungkap Nyoto dalam diskusi bertema Tata Kelola Sampah Makanan Indonesia, baru-baru ini.

Nyoto menyatakan, sekitar 17% pangan dunia terbuang percuma dan menjadi sampah karena praktik kehilangan dan pemborosan pangan (*food loss and waste/FLW*). Hilangnya mutu kualitas saat produksi pascapanen, penyimpanan, sampai pengeemasan disebut *food loss* (FL). Sedangkan *food waste* (FW) adalah sampah yang terjadi pada sistem pasar dan selama konsumsi dalam tingkat rumah tangga dan bisnis. Hal ini secara langsung maupun tidak langsung tentu menimbulkan dampak terhadap ketahanan pangan dan gizi. “Pemerintah melalui Bapanas telah merumuskan sejumlah strategi dalam menangani permasalahan tersebut. Salah satunya adalah dengan kampanye nasional GSP,” papar Nyoto Suwignyo.

GSP digalakkan dalam upaya penyelamatan pangan



berpotensi FW, yakni pangan yang tidak termasuk pangan sisa (*leftover food*) tapi asih dalam kondisi baik dan aman serta berpotensi terbuang atau dimusnahkan bila tidak dimanfaatkan. Kegiatan GSP di antaranya dengan menyalurkan atau mendonasikan sebagian besar pangan berlebih kepada masyarakat yang membutuhkan untuk dikonsumsi, serta sisanya untuk pemanfaatan nonpangan, seperti pakan hewan, pemanfaatan industri, dan pupuk. “GSP ini juga disertai penetapan kebijakan pendonasian pangan di 12 ibu kota provinsi yang merujuk pada gejala di mana sebagian besar FW dihasilkan di kota yang terdapat surplus pangan di sana, serta upaya sosialisasi/promosi pencegahan FW melalui kampanye Stop Boros Pangan dan Belanja Bijak,” tutur Nyoto.

Nyoto memaparkan, GSP merupakan hasil dari arahan Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi untuk menangani permasalahan FLW secara konstruktif, sekaligus sejalan dengan amanat Presiden Joko Widodo agar Indonesia me-

waspada ancaman krisis pangan. Sesuai studi Bappenas, pada 2000-2019, Indonesia menghasilkan 23-48 juta ton sampah makanan per tahun. Jumlah sampah makanan itu sepatutnya bisa menghidupi 61-125 juta orang atau setara 29-47% populasi rakyat RI. “Dari estimasi tersebut diharapkan pemanfaatan pangan akan semakin efektif setelah adanya GSP, hal ini setelah melihat bahwa timbulan kontribusi FL cenderung menurun dari 61% menjadi 45% pada 2019,” jelas dia.

Sementara itu, Direktur Pengurangan Sampah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Vinda Damayanti mengungkapkan, pihaknya fokus terhadap sampah yang dihasilkan dari konsumsi pangan. Pada 2022, di Indonesia tercatat 69,2 juta ton sampah dengan 41,27% di antaranya berupa sampah pangan dan sumber sampahnya 38,28% dari rumah tangga. Pemanfaatan sampah pangan bisa dilakukan melalui upaya komposting serta pembuatan *ecoenzyme* dan biogas dalam proses pengurangan sampah


pangan.

Target pengurangan sampah pada 2025 ditetapkan 30%, namun hingga 2022 pengurangan sampah baru tercatat 14%. “Perlu penyadaran masyarakat dengan sosialisasi dan kampanye,” tandas Vinda.

## Cadangan Beras

Pada bagian lain, Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi menyebutkan, Perum Bulog telah mengamankan cadangan beras 1,3 juta ton untuk menghadapi kemarau ekstrem akibat El Nino. Bulog juga akan menerapkan beras domestik dengan target 2,4 juta ton hingga akhir tahun ini. “Sebanyak 1,3 juta ton stok Bulog *secured* per 2 Agustus 2023. Bapak Presiden meminta Bulog meningkatkan stoknya dari yang sudah di-*secured* 1,3 juta ton dengan target serapan 2,4 juta ton sampai akhir 2023,” ujar Arief dalam keterangan yang dikutip Kamis (03/08/2023) terkait hasil rapat beras dengan Presiden Joko Widodo.

Arief juga menyampaikan, Bulog telah menyalurkan beras lebih dari 1,34 juta ton untuk stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) serta bantuan pangan beras (BPB) bagi masyarakat berpendapatan rendah. BPB periode tiga bulan pertama sampai akhir Juli 2023 sebanyak 640 ribu ton telah selesai digelontorkan untuk 21,35 juta keluarga penerima manfaat (KPM). “Pemberian bantuan beras ini sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat berpendapatan rendah, di samping memengaruhi keseimbangan harga di pasaran sehingga harga stabil dan inflasi empat bulan terakhir sangat terjaga,” ujar Arief. Karena itu, BPB akan disalurkan lagi untuk periode kedua pada Oktober-Desember 2023, volume dan sasaran sama seperti tahap pertama.

Title	PIHC Telah Salurkan 3,83 Juta Ton Pupuk	 Kementerian Pertanian
Date	4 Agustus 2023	
Media	Investor Daily	
Page	12	
Author	TI	

## PIHC Telah Salurkan 3,83 Juta Ton Pupuk

**JAKARTA, ID**—Pupuk Indonesia Holding Company (PIHC) atau PT Pupuk Indonesia (PI Persero) sebagai produsen telah menyalurkan pupuk bersubsidi sesuai alokasi yang ditetapkan pemerintah. Hingga 28 Juli 2023, realisasi penyaluran pupuk bersubsidi secara nasional oleh PIHC mencapai 3,83 juta ton, yakni urea 2,25 juta ton dan NPK 1,55 juta ton. Sementara, per 31 Juli 2023, stok pupuk bersubsidi nasional yang tersedia di gudang lini III atau tingkat kabupaten tercatat 853.255 ton atau setara 353% dari ketentuan minimum yang ditetapkan pemerintah, rinciannya urea 513.604 ton dan NPK 339.651 ton.


SVP Sekretaris Perusahaan PIHC Wijaya Laksana mengatakan, peningkatan kemampuan dan pelayanan penyaluran pupuk bersubsidi juga dilakukan dengan menerapkan digitalisasi kios. Hingga saat ini, PIHC telah melakukan uji coba digitalisasi kios di lima provinsi, yaitu Bali, Aceh, Bangka Belitung, Riau, dan Kalimantan Selatan. Dalam waktu dekat, PIHC bersama Kementerian Pertanian (Kementan) akan terus memperluas wilayah penerapan digitalisasi kios. “Penyerapan pupuk bersubsidi biasanya akan kembali meningkat saat memasuki musim hujan yang biasanya terjadi pada akhir tahun. Pada kesempatan itu, kios-kios akan kembali meningkatkan stoknya. Kami juga melakukan digitalisasi kios,” jelas dia.

Dalam keterangan yang dikutip Kamis (03/08/2023), Wijaya menjelaskan, digitalisasi kios akan mengubah drastis proses administrasi kios, dari sebelumnya mengisi banyak formulir kertas, kini semua terekam secara digital dan *online* dalam sebuah aplikasi. Dengan demikian, setiap transaksi penebusan pupuk bersubsidi tercatat *real time*, sehingga meningkatkan transparansi hingga ketepatan penerima pupuk bersubsidi. “PIHC secara berkelanjutan terus meningkatkan kemampuan dan pelayanan dalam penyaluran pupuk bersubsidi. Salah satunya sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman distributor dan kios terkait regulasi hingga mendukung penerapan digitalisasi kios guna memudahkan petani menebus pupuk bersubsidi,” tutur dia.

PIHC baru saja mendapat nakhoda baru. Kementerian BUMN mengangkat Rahmad Pribadi sebagai Direktur Utama PIHC menggantikan Bakir Pasaman yang telah menjabat sejak 2020. Hal tersebut berdasarkan Keputusan Menteri BUMN No SK-212/MBU/07/2023 tanggal 27 Juli 2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Direktur Utama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pupuk Indonesia. Rahmad Pribadi sebelumnya adalah Direktur Utama PT Pupuk Kalimantan Timur pada 2020-2023. **(ti)**

Dokumentasi

**BIRO HUMAS DAN INFORMASI PUBLIK  
KEMANTAN**

Title	Pratik Berkelanjutan untuk Kesejahteraan	 Kementerian Pertanian
Date	4 Agustus 2023	
Media	Kompas	
Page	9	
Author	Mediana	

## KOMODITAS

# Praktik Berkelanjutan untuk Kesejahteraan

Beberapa tahun terakhir, pola pertanian kopi berkelanjutan berkembang di sejumlah titik daerah produsen kopi. Pola pertanian seperti ini diyakini mampu menghasilkan peningkatan produktivitas kopi dan peningkatan kesejahteraan petani dengan adanya implementasi tumpang sari atau *agroforestry* di sela-sela tanaman kopi.

Provinsi Lampung, yang menjadi salah satu provinsi penghasil kopi terbesar di Indonesia pada 2022, turut menerapkan pola pertanian kopi berkelanjutan. Sebagai contoh, lebih dari 800 kelompok tani di Kelurahan Gunungsari, Kecamatan Ulu Belu, Kabupaten Tanggamus, telah mempraktikkan pola itu. Perusahaan perdagangan komoditas PT Louis Dreyfus Company (LDC) Trading Indonesia turut membina petani kopi di sana.

Asnawi, salah seorang petani binaan, menceritakan, setelah menerapkan pola pertanian kopi berkelanjutan, produksi kopi miliknya bisa naik 1,5 ton. Harga jual kopi pun menjadi lebih tinggi.

"Tata kelola kebun kopi lebih baik. Sebab, saya akhirnya paham cara pemangkasan ranting kopi yang tepat supaya tanaman kopi tumbuh lebih sehat, produktif, dan menghasilkan biji kopi yang berkualitas lebih tinggi. Pengurusan batang tanaman kopi jadi lebih tepat," ujarnya, Rabu (2/8/2023), di Kelurahan Gunungsari.

Asnawi mengatakan, ketika praktik tumpang sari diterapkan, ia bisa memanen komoditas lain, seperti cabai dan lada. Kedua komoditas ini mudah digunakan langsung untuk kebutuhan keluarga sehari-hari, selain dijual ke orang lain.

### Tren global

Sejak 2010, LDC secara global berkomitmen menjalankan bisnis berkelanjutan di semua rantai pasoknya. Pembinaan pola pertanian kopi berkelanjutan yang dikemas dalam program Stronger Coffee adalah bagian dari komitmen itu. Apalagi, di tingkat internasional, LDC telah menduduki tiga besar *trader* untuk kategori *green coffee*.

"LDC hadir di 10 negara penghasil kopi terbesar di dunia. Sepuluh negara ini menyuplai 85 persen terhadap total produksi global. Mengaplikasikan pertanian kopi berkelanjutan sebenarnya tuntutan permintaan pasar secara global, selain dari sisi petani membutuhkan rantai produksi yang berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan mereka," tutur Head of Robusta Origination and Responsible Sourcing Manager LDC Indonesia Melissa Mustopo.

Pembinaan pertanian kopi berkelanjutan dilakukan oleh LDC Indonesia sejak 2014. Provinsi Lampung, tempat LDC Indonesia memiliki aset, dipilih sebagai lokasi pembinaan petani. Ada pula di wilayah Sumatera lainnya, seperti Sumatera Utara. Total petani binaan secara nasional lebih dari 15.000 petani.

Pembinaan pola pertanian berkelanjutan yang dilakukan LDC Indonesia dimulai dari pemangkasan ranting/cabang tanaman kopi, konservasi tanah berupa pembuatan lubang angin tanah (rorak), sistem tumpang sari, hingga pembuatan kompos kulit ceri kopi. Kelompok petani yang jadi mitra diberikan pelatihan pascapanen dan keterlaksanaan kopi. Keterlaksanaan kopi merupakan praktik penting dalam industri kopi karena memberikan informasi transparan mengenai rantai pasok, memastikan kualitas, dan keaslian biji kopi.

"(Setidaknya), pola pertanian berkelanjutan mampu memberikan kenaikan harga jual yang adil bagi petani. Pada saat kondisi cuaca tak mendukung, seperti hujan yang panjang, mereka tidak bisa memanen kopi tetapi tetap dapat memanen buah-buahan dari wanatani," imbuh Melissa.

Ahli agronomi LDC Trading Indonesia, Danang Arif Maulana, berpendapat, praktik baik yang terangkum dalam pola pertanian kopi berkelanjutan sebenarnya bukan sesuatu yang baru bagi petani. Sebagai contoh adalah pemakaian pupuk kompos. Sejumlah petani dinilai telah mengetahui bahwa dedaunan kering dari pohon penampung ataupun kulit ceri kopi bisa dipakai sebagai bahan pupuk kompos.

Ada pula petani sudah tahu bahwa kulit ceri kopi bisa digunakan sebagai bahan pupuk kompos, tetapi tidak paham cara menggunakannya secara benar. Kulit ceri kopi yang masih panas terburu-buru dibawa ke kebun.

"Praktik pemangkasan ranting/cabang tanaman kopi, misalnya. Mereka sebenarnya sudah tahu, tetapi mereka sering kali telat melakukannya. Padahal, praktik ini adalah kunci panen tahun selanjutnya," kata Danang.


### Perhutanan sosial

Kepala Bidang Penyuluhan, Pemberdayaan Masyarakat, dan Usaha Kehutanan Dinas Kehutanan Provinsi Lampung Wahyudi menambahkan, Dinas Kehutanan Provinsi Lampung terbuka terhadap program perhutanan sosial. Ini merupakan sistem pengelolaan hutan lestari yang dijalankan dalam kawasan hutan negara atau hutan adat. Masyarakat setempat atau hukum adat sebagai pelaku utamanya.

Kelompok petani perhutanan sosial berizin biasanya memiliki unit bisnis yang variatif. Di Provinsi Lampung, mereka mempunyai unit usaha bukan hanya kopi atau sistem tumpang sari. Saat ini Lampung memiliki 348 unit perhutanan sosial legal, dengan luas area 200 hektar. Sebanyak 91.114 keluarga terlibat dalam program ini.

"Terkait perhutanan sosial, petani yang legal boleh meningkatkan usahanya melalui cara kerja sama dengan badan usaha milik negara, daerah, dan swasta. Para badan usaha itu dapat mendampingi atau ikut membina petani sehingga petani memperoleh pendapatan dari hasil perhutanan sosial secara *fair*," tutur Wahyudi.

Menurut Wahyudi, pihaknya belum mempunyai data valid mengenai peningkatan produktivitas lahan dan kesejahteraan setelah perhutanan sosial mengimplementasikan sistem tumpang sari. Hanya saja, berdasarkan pengamatannya, terjadi peningkatan dalam wujud perbaikan rumah atau kenaikan jumlah kendaraan pribadi petani. (MEDIANA)

Title	Antisipasi El Nino	
Date	4 Agustus 2023	
Media	Koran Kontan	
Page	15	
Author	Barratut Taqiyyah	

## Antisipasi El Nino

MENTERI Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo memastikan bahwa ketersediaan beras nasional cukup baik hingga September tahun ini.


"Sampai September kita masih punya *overstock* di atas 2,7 juta [ton]. Artinya, dari setiap bulan masih ada panen di atas 800.000 hektare, itu menghasilkan cukup

untuk kebutuhan kita setiap bulannya di atas 2 jutaan," kata Mentan.

Melansir Infopublik.id, Menteri Syahrul Yasin menjelaskan, Presiden Joko Widodo juga meminta jajarannya untuk mempersiapkan dan memastikan ketersediaan beras nasional dalam menghadapi fenomena El Nino yang memicu kekeringan dan menurunnya produktivitas pertanian.

"Kita akan mempersiapkan kurang lebih 500 ribu hektare untuk antisipasi El Nino. Walaupun dalam kenyataan sampai hari ini tentang El Nino dan lain-lain sebagainya yang digambarkan akan panas dan lain-lain, saya habis cek beberapa waduk-waduk dan dam kita yang besar, ternyata airnya cukup," kata Syahrul.

**Barratut Taqiyyah**

Title	Harga Minyak Sawit Turun, Emiten Sawit Kurang Bertenaga	 Kementerian Pertanian
Date	4 Agustus 2023	
Media	Koran Kontan	
Page	3	
Author	Pulina Nityakanti	

## ■ KINERJA EMITEN

# Harga Minyak Sawit Turun, Emiten Sawit Kurang Bertenaga

JAKARTA. Kinerja sejumlah emiten saham produsen minyak kelapa sawit alias *crude palm oil* (CPO) tercatat turun di semester I 2023.

Tengok saja PT Astra Agro Lestari Tbk (AALI) AALI membukukan pendapatan bersih Rp 9,39 triliun di semester I 2023. Pendapatan ini turun 14,3% dibandingkan dengan semester I 2022 sebesar Rp 10,96 triliun.

Laba periode berjalan AALI juga turun 54,94% ke Rp 377,4 miliar di semester I 2023. Padahal pada semester I 2022 anak usaha dari Grup Astra ini masih meraup laba Rp 837,6 miliar.

Begitu juga dengan penjualan PT Sampoerna Agro Tbk (SGRO) di periode sama juga turun tipis 2,93% menjadi Rp 2,55 triliun. Padahal, periode

sebelumnya sempat menyentuh Rp 2,624 triliun. Laba yang dapat diatribusikan SGRO di semester I-2023 merosot hingga 62,69% menjadi Rp 201,75 miliar dari sebelumnya yang sebesar Rp 540,75 miliar (semester I-2022)

Senasib, pendapatan PT PP London Sumatra Indonesia Tbk (LSIP) di periode serupa juga turun 7,9% menjadi Rp 1,88 triliun di semester I-2023. Laba perusahaan ini juga merosot 69,6% ke level Rp 166,5 miliar dibandingkan periode sama tahun 2022 yang sebesar Rp 548,7 miliar.

Lalu, PT Triputra Agro Persada Tbk (TAPG) juga mencatatkan penurunan penjualan 18,22% di semester I-2023 dari periode serupa 2022 menjadi Rp 3,77 triliun.

*Investment Analyst Info-*

vesta Kapital Advisor, Fajar Dwi Alfian mengatakan, secara umum, penurunan kinerja yang dicatatkan emiten saham sawit tersebut secara tahunan akibat penurunan harga minyak sawit.


Di sisi lain, "Harga CPO tahun lalu memang mengalami akselerasi ke level tertinggi sepanjang masa," ujarnya kepada Kontan, Kamis (3/8).

Pada semester II tahun ini, ia memproyeksi ada peluang harga CPO naik. Pendorongnya, ancaman El Nino yang mengancam produktivitas sawit. Persoalannya, permintaan CPO di separuh kedua ini belum pulih, meski ekonomi China menggeliat. Alfian masih belum merekomendasikan saham CPO.

**Pulina Nityakanti**

Dokumentasi

**BIRO HUMAS DAN INFORMASI PUBLIK  
KEMANTAN**

Title	Kebijakan Pupuk Subsidi Bermasalah	 Kementerian Pertanian
Date	4 Agustus 2023	
Media	Koran Kontan	
Page	14	
Author	Vendy Yhulia Susanto	

## ■ PUPUK SUBSIDI

# Kebijakan Pupuk Subsidi Bermasalah

JAKARTA. Ombudsman RI mendorong perbaikan penyelenggaraan pelayanan publik pada tata kelola pupuk bersubsidi. Wakil Ketua Ombudsman RI, Bobby Hamzar Rafinus menyampaikan, Ombudsman telah menyelesaikan kajian sistemik pada tahun 2021 tentang pencegahan maladministrasi dalam tata kelola pupuk bersubsidi. Mereka juga menggelar investigasi mengenai dugaan maladministrasi dalam pendataan dan penebusan pupuk bersubsidi menggunakan kartu tani pada tahun 2022.

Berdasarkan hasil kajian dan investigasi Ombudsman, permasalahan yang ditemukan dalam program pupuk bersubsidi di antaranya adalah tujuan kebijakan pupuk bersubsidi yang dirasa belum jelas dan tepat.

Kemudian, kriteria petani penerima pupuk bersubsidi yang juga belum jelas dan tepat, data petani penerima yang belum akurat, proses penyaluran yang kurang tepat sasaran dan desain perencanaan anggaran yang kurang

proporsional.

Terhadap berbagai masalah itu, Ombudsman mendorong perbaikan dan transformasi dalam kebijakan pupuk bersubsidi. Bobby menyebut, Ombudsman melibatkan 34 kantor perwakilan di seluruh provinsi untuk ikut mengawal program pupuk bersubsidi, baik memberikan masukan kepada penyelenggara maupun menerima pengaduan dari masyarakat.

"Acara ini penting bagi kita semua mendorong perbaikan dan transformasi kebijakan pupuk bersubsidi," kata Bobby dalam *workshop* Transformasi Kebijakan Pupuk Bersubsidi, Kamis (3/8).


Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo menyampaikan, agenda *workshop* ini merupakan wadah koordinasi berbagai pihak untuk memperbaiki masalah pupuk bersubsidi.

"Kita berharap meneemumkan sistem yang lebih akurat. Berapa besarnya orang tiap daerah yang tersentuh pupuk bersubsidi," ucap Syahrul.

**Vendy Yhulia Susanto**

Dokumentasi

**BIRO HUMAS DAN INFORMASI PUBLIK  
KEMANTAN**

Title	Menanti Pemulihan Permintaan CPO	 Kementerian Pertanian
Date	4 Agustus 2023	
Media	Koran Kontan	
Page	5	
Author	Akmalal Hamdhi	

# Menanti Pemulihan Permintaan CPO

Kinerja PT Astra Agro Lestari Tbk di semester I 2023 tertekan permintaan CPO yang lesu dan harga jual lebih rendah dari perkiraan

Akmalal Hamdhi

JAKARTA, PT Astra Agro Lestari Tbk (AALI) mencatatkan kinerja kurang memuaskan di separuh pertama tahun 2023. Pendapatan dan laba emiten perkebunan kelapa sawit ini negatif karena mengalami penurunan penjualan *crude palm oil* (CPO).

Analisis Ciptadana Sekuritas, Yasmin Souliasa mencermati, penghasilan AALI yang mengecewakan karena biaya tinggi dan penjualan yang lebih rendah. Penjualan CPO alias minyak sawit mentah lesu karena harga CPO global tidak mendukung.

Pendapatan AALI secara kumulatif di semester pertama 2023 turun 14,4% YoY

menjadi Rp 9,39 triliun. Sementara, laba merosot 54,6% yoy menjadi Rp 368 miliar karena semua segmen mengalami pertumbuhan negatif.

Penjualan CPO turun 9,1% secara tahunan menjadi Rp 8,65 triliun. Sementara, Kernel Sawit (PK) turun 25,1% secara tahunan menjadi Rp 699 miliar. Produk sawit lainnya juga sedikit menurun 1,7% secara tahunan menjadi Rp 39 miliar.

Pendapatan AALI yang melesu terutama karena harga CPO dunia yang lebih rendah dari perkiraan di semester I-2023. Rata-rata, harga CPO dunia turun 4,4% secara kuartalan menjadi RM 3.840 per ton di kuartal kedua 2023. Sehingga, harga rata-rata CPO global menjadi RM 3.929 per

ton untuk periode semester I-2023, atau turun 37,8% secara tahunan.

Dari segi produksi, produksi Tandem Buah Segar (TBS) dan CPO AALI masih relatif sejalan dengan estimasi Ciptadana Sekuritas. Produksi TBS menjadi 2,11 juta ton pada semester I-2023, atau meningkat

**Pemilu bisa jadi momentum mengangkat permintaan CPO di Tanah Air.**

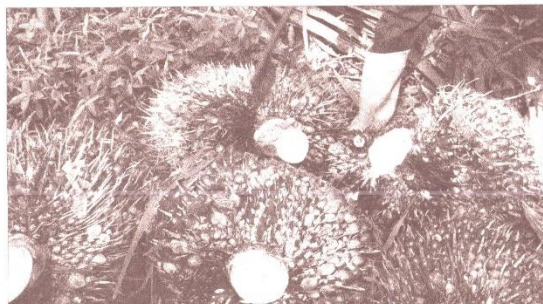
7,9% secara tahunan. Sedangkan produksi CPO mencapai 619.000 ton atau sedikit turun 3,1% secara tahunan karena rata-rata utilisasi pabrik yang lebih rendah.

Menurut Yasmin, persediaan CPO yang tinggi di Indonesia dan Malaysia berperan terhadap penurunan harga minyak sawit mentah. Di samping itu, situasi global juga kurang menguntungkan. India sebagai salah satu pengimpor minyak sawit terbesar di dunia menaikkan pajak impor minyak sawit.

Efek El Nino

Sisi baiknya, program pencampuran biodiesel yang lebih tinggi sebesar 35% dari 30% di tahun lalu diharapkan mendukung permintaan minyak sawit dalam negeri. Peningkatan kebutuhan biodiesel dari B30 ke B35 tersebut artinya porsi CPO yang dibutuhkan juga turut meningkat.

Selain itu, harga CPO bisa menanjak akibat fenomena El Nino yang menyebabkan suhu



KONTAN/Bahoki

Pendapatan AALI secara kumulatif di semester pertama 2023 turun 14,4% YoY menjadi Rp 9,39 triliun.

global memanas. Peluang 50% hingga 60% El Nino terjadi pada semester II-2023. Secara historis cuaca ekstrem mengarah kepada penguatan harga komoditas.

Hanya saja, Analisis RHB Sekuritas Hoe Lee Long dalam riset 24 Juli 2023 memandang, dampak El Nino pada produksi minyak sawit baru akan terlihat pada tahun 2024.

Terlepas dari dampak El Nino yang kuat dan perang Rusia-Ukraina yang mengubah ekspor tanaman apapun dari Laut Hitam, prospek fundamental bagi emiten CPO dinilai relatif kurang menarik. Pasokan CPO masih banyak dan tidak diimbangi oleh per-

mintaan yang seimbang.

Senior Investment Information Mirae Asset Sekuritas, Muhammad Nafan Aji menyebutkan, sentimen positif untuk meningkatkan permintaan CPO adalah kehadiran China dan India untuk menyerap ketersediaan minyak sawit mentah. Prospek perekonomian yang lebih baik dari kedua negara importir terbesar CPO tersebut akan membantu penyerapan.

Dari domestik, pemilu bisa menjadi momentum untuk mengangkat permintaan minyak sawit mentah yang memiliki produk turunan salah satunya minyak goreng.

"Dengan pemulihan ini bisa

menjadi motor bagi permintaan CPO di kawasan Asia maupun global. Tetapi sentimen di kawasan Eropa terkait pengesahan UU Deforestasi masih membatasi permintaan," jelas Nafan Kamis (38).

Nafan merekomendasikan *hold* AALI dengan target harga Rp 8.250 per saham. Sedangkan, Yasmin merekomendasikan *buy* AALI dengan target harga Rp 9.400 per saham. Hoe Lee heng menyarankan *sell* AALI dengan target harga Rp 6.700 per saham.

AALI masih dinilai terlalu tinggi dengan *price earning* (PE) 12 kali pada 2024 dibandingkan perusahaan sejenis di kisaran 5 kali-10 kali.


Kinerja PT Astra Agro Lestari Tbk		
(Rp miliar, kecuali laba bersih per saham)		
	Per 30/06/2022	Per 30/06/2023
Total Aset	30.233,99	29.215,42
Total Kewajiban	8.884,80	7.279,33
Total Ekuitas	20.829,22	21.458,77
Pendapatan	10.964,78	9.390,93
Laba Kotor	1.820,59	1.027,49
Laba Usaha	1.180,27	331,13
Laba Bersih	809,31	367,57
Laba Bersih per Saham	420,49	190,98
Margin Laba Kotor (%)	18,14	14,95
Margin Laba Usaha (%)	12,11	7,46
Margin Laba Bersih (%)	8,72	6,34
ROA (%)	7,05	4,40
ROE (%)	10,23	5,99

Sumber: RII



Dokumentasi

BIRO HUMAS DAN INFORMASI PUBLIK  
KEMANTAN

Title	Pukulan El Nino & Fed	 Kementerian Pertanian
Date	4 Agustus 2023	
Media	Koran Kontan	
Page	15	
Author	Barly Haliem Noe	

## Tajuk

# Pukulan El Nino & Fed

Barly Haliem Noe

Selepas menikmati surplus dagang dan bonanza harga komoditas, kini ekonomi Indonesia memasuki masa krusial. Kenaikan harga pangan dan pelemahan rupiah saat bersamaan akan mengerek inflasi dan menjegal laju ekonomi.

Baru-baru ini Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengungkapkan, Indonesia akan menghadapi El Nino lebih ekstrem dibanding situasi sama tahun 2019. Fenomena iklim ini diperkirakan berlangsung hingga Desember 2023.

Proyeksi BMKG, sekitar 63% wilayah Indonesia sudah terdampak El Nino, mayoritas sentra produsen beras. Efek El Nino yang harus diwaspadai adalah gagalnya panen padi serta terganggunya pasokan pangan. Wajar bila belakangan ini harga beras di tingkat pemasok menembus Rp 11.500 per kg, dari dua bulan lalu seharga Rp 10.000 per kg.

Stok beras bisa saja dipenuhi dari impor. Persoalannya, sejumlah negara produsen beras dunia pun membatasi ekspor beras demi menjaga stok dalam negerinya.

India bahkan menyatakan akan menutup keran ekspor beras ke luar negeri. Sementara Vietnam mengurangi jatah pembelian beras dari setiap negara calon pembelinya lantaran membeludaknya pesanan baru

yang masuk ke negara itu.

Situasi kian rumit lantaran Bank Sentral Amerika Serikat atau The Federal Reserve (Fed) kembali menaikkan lagi suku bunga acuan menjadi kisaran 5%-5,25%. Kini jarak antara bunga acuan Fed dengan bunga acuan Bank Indonesia (BI) berselisih tipis sebesar 50 basis poin.

Tipisnya gap bunga acuan BI dengan Fed Rate memberi implikasi yang *complicated*. Ibarat magnet penarik besi, kenaikan bunga Fed berpeluang menarik pulang dollar AS yang berkeliaran di luar negeri.

Bagi Indonesia, seretnya suplai dollar akan berefek langsung menekan rupiah. Itulah mengapa kini rupiah melemah lagi ke level Rp 15.200 per dollar AS, sebagai rentetan imbas kenaikan bunga The Fed.


Bagi kita, ujung cerita El Nino serta lemahnya rupiah adalah makin beratnya biaya hidup. Sebab harga pangan naik akibat gagal panen, sementara barang impor melejit karena rupiah melemah. Kita bak terkena pukulan ganda; *jab* dari efek El Nino, serta *hook* dari lesunya rupiah.

Nah, sinyal laju inflasi sudah terlihat. Juli lalu inflasi mulai naik dibanding dengan bulan sebelumnya, meski secara tahunan relatif turun.

Kita berharap, para petinggi negeri tak hanya sibuk mencari kawan koalisi dan abai pada ancaman inflasi. Tahun politik niscaya lebih membara jika harga beras makin panas. ■

Dokumentasi

**BIRO HUMAS DAN INFORMASI PUBLIK  
KEMANTAN**

Title	Kemarau Pengaruhi Musim Tanam	 Kementerian Pertanian
Date	4 Agustus 2023	
Media	Media Indonesia	
Page	8	
Author	Benny Bastiandy	



**KEBUTUHAN AIR BERSIH:** Warga Desa Gilirejo, Miri, Sragen, antre mendapatkan air bersih bantuan BPBD Sragen. Situasi krisis air bersih pada awal Agustus ini semakin meluas, yang membuat Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sragen, setiap tiga hari sekali keliling desa untuk menyuplai air bersih.

# Kemarau Pengaruhi Musim Tanam

*Kemarau panjang dan fenomena El Nino berdampak pada penyerapan pupuk bersubsidi dan musim tanam berpotensi mundur.*

**BENNY BASTIANDY**  
*benny@mediaindonesia.com*

**S**EKTOR pertanian di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, dihadapkan pada potensi kekeringan sebagai dampak kemarau. Kondisi tersebut juga diprediksi bakal berpengaruh terhadap penyerapan pupuk bersubsidi dari pemerintah.

Vice Presiden Penjualan Wilayah 3A Pupuk Indonesia, Aviv Ahmad Fadhil, menuturkan dampak El Nino terhadap penurunan penyerapan pupuk bisa dilihat dua bulan ke depan. Artinya, kalau selama September dan Oktober tidak ada hujan, akan berdampak terhadap mundurnya masa tanam.

"Kemungkinan (masa tanam) akan

pindah tahun depan. Itu kemungkinan yang bisa kita prediksi dari dampak El Nino. Jadi, setelah September atau Oktober," kata Aviv saat mengecek stok pupuk di Gudang Lini III Pasirhayam di Desa Sirnagalih, Kecamatan Cilaku, Kabupaten Cianjur, kemarin.

Aviv menuturkan tingkat permintaan pupuk di kalangan petani kurang dua bulan terakhir cenderung turun. Kondisi itu dipicu berakhirnya masa tanam sekitar tiga bulan lalu.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan akan membangun lumbung pangan di 12 kabupaten/kota untuk menghadapi perubahan iklim dan El Nino terhadap ketahanan pangan di daerah.

"Dalam menghadapi dampak El Nino dan ancaman ketahanan pangan kita akan membangun lumbung pangan di daerah. Di Kalsel akan dibangun 12 lumbung pangan," kata Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian, Jan S Maringka.

Selain itu, pemerintah juga akan mengucurkan dana bantuan untuk mendukung peningkatan ketahanan pangan senilai Rp66,53 miliar di antaranya untuk bidang tanaman pangan dan peternakan.

BMKG Stasiun Klimatologi Kelas II Nusa Tenggara Timur (NTT) mengeluarkan peringatan dini kekeringan meteorologis dengan status waspada, siaga, hingga awas di daerah itu.

Kepala Stasiun Klimatologi Kelas II NTT, Rahmatulloh Adji, mengatakan ada 6 kecamatan di 4 kabupaten kini yang berstatus awas kekeringan karena selama 61 hari berturut-turut tidak turun hujan.

"Beberapa wilayah di NTT mengalami hari tanpa hujan lebih dari 21 hari hingga lebih dari 60 hari, diperlukan kewaspadaan terkait ancaman bencana kekeringan," jelas Rahmatulloh Adji.

## Krisis air bersih

Selain ancaman masalah pangan, kekeringan dampak El Nino menyebabkan banyak daerah mengalami kekeringan dan membutuhkan bantuan air bersih.

Dataran tinggi dan daerah yang jauh dari sumber air merupakan daerah berpotensi mengalami kekeringan di Kota Pangkalpinang, Provinsi Bangka Belitung.

"Ada beberapa keluhan berpotensi krisis air bersih karena


daerahnya di dataran tinggi dan jauh dari sumber air," kata Kepala Bidang Pencegahan Kesiapsiagaan BPBD Kota Pangkalpinang.

Ibu kota Provinsi Jawa Tengah, Kota Semarang, juga menghadapi krisis air bersih. Ribuan warga mulai kesulitan air bersih. "Wilayah kekeringan di kota ini meluas," ujar Kepala Bidang Kebencanaan BPBD Kota Semarang, Bambang Haryanto.

Distribusi air bersih terus berlanjut di sejumlah daerah. Hingga saat ini Pemkab Temanggung melalui BPBD setempat telah menyalurkan 40 ribu liter air bersih ke sejumlah kecamatan yang mengalami kekeringan.

Polresta Sidoarjo, Jawa Timur, menyalurkan bantuan air bersih sebanyak 20 truk tangki PDAM Delta Tirta ke masyarakat. Bantuan dari Polresta Sidoarjo diberangkatkan oleh Wakapolresta Sidoarjo AKB Deny Agung Andriana di Mako Polresta Sidoarjo.

Fenomena El Nino pada musim kemarau tahun ini sudah mulai menggerus ketersediaan air bersih di puluhan desa yang tersebar di enam kecamatan, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, sejak Juni lalu. (DY/PO/AS/WJ/YH/HS/TS/RF/BK/N-1)

Title	Waspada El Nino Picu Penyebaran Karhutla	
Date	4 Agustus 2023	
Media	Media Indonesia	
Page	8	
Author	SS/RK/DW/RR/AD/N-1	

# Waspada El Nino Picu Penyebaran Karhutla

BADAN Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Pemerintah Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah, melaporkan luas lahan yang terbakar pada musim kemarau tahun ini mencapai 46 hektare (ha) dengan jumlah kejadian mencapai 87 kali.

“Pemerintah akan segera menambah jumlah personel untuk melakukan pemadaman kebakaran. Saat ini sedang kita ajukan kepada pimpinan untuk penambahan personel,” kata Kepala BPBD Kota Palangka Raya, Emi Abriyani, kemarin.

Kebijakan itu dilakukan mengingat saat ini banyak kejadian karhutla yang terjadi dalam waktu bersamaan, tetapi lokasinya tersebar. Oleh karena itu, diperlukan personel tambahan untuk mengantisipasi meningkatnya kejadian karhutla tersebut.

Upaya memadamkan karhutla di Provinsi Riau menggunakan teknologi modifikasi cuaca (TMC) hujan buatan. Namun, pelaksanaan TMC baru bisa dilaksanakan Senin (7/8) karena harus menunggu kesiapan pesawat TNI-AU.

“Insya Allah minggu depan, menunggu konfirmasi kesiapan

pesawat TNI-AU,” kata Koordinator Laboratorium TMC Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Budi Harsoyo kepada *Media Indonesia*, kemarin.


Provinsi Sulawesi Tenggara juga siaga menghadapi karhutla. Sekretaris Daerah Provinsi Sultra, Asrun Lio mengimbau masyarakat untuk waspada terhadap karhutla.

“Karena kita masih berada pada cuaca musim transisi ini, kita harapkan masyarakat tetap waspada terhadap kebakaran hutan lahan,” kata Asrun Lio.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Sumatra Selatan kembali mengingatkan pemerintah daerah terkait perkembangan El Nino saat ini berstatus moderat.

“Kita harus waspada dampak El Nino moderat ini. Potensi tingkat kekeringan akan meningkat. Dampaknya penurunan curah hujan hingga 70%,” kata Koordinator Bidang Data dan Informasi BMKG Sumatra Selatan, Nandang Pangaribowo.

Pemerintah Kabupaten Garut juga menetapkan status siaga darurat bencana kekeringan serta karhutka setelah beberapa bulan tidak turun hujan. (SS/RK/DW/RR/AD/N-1

Title	Gurih Mete Sultra yang Melintasi Benua	 Kementerian Pertanian
Date	4 Agustus 2023	
Media	Kompas	
Page	1 Part 1	
Author	Saiful Rijal Yunus	

## KULINER KHAS

# Gurih Mete Sultra yang Melintasi Benua

*Olahan mete asal "Bumi Anoa" semakin bervariasi dengan rasa yang memanjakan lidah. Diolah oleh masyarakat, mete semakin dikenal hingga ke mancanegara.*

**Saiful Rijal Yunus**

**B**erjaya sejak puluhan tahun lalu, jambu mete asal Sulawesi Tenggara kini dikomodifikasi dalam beragam bentuk olahan. Keripik, cokelat, dan brownies yang diolah dengan mete adalah beberapa di antaranya. Penganan ini berlayar dari Teluk Kendari, mengarungi Selat Makassar, melintasi samudra, dan mendarat di beberapa benua.

Suatu waktu pada 2019, La Ato (25), yang saat itu masih duduk di bangku kuliah, menerima pesan di telepon pintarnya. Seseorang yang tidak dikenalnya mengirimkan foto. Itu adalah cokelat mete buatannya yang berlatar belakang sebuah kota di Amerika Serikat.


"Ada yang kirimkan, saya tidak tahu juga siapa. Pas dapat foto itu, perasaan sudah tidak tahu lagi. Hasil karya saya bisa sampai di luar negeri dan dikenal orang. Saya saja belum pernah keluar dari Sultra," kata Ato, akhir Juli lalu.

Di sebuah kamar kos-kosan berukuran 3 meter x 6 meter di Kendari, Sulawesi Tenggara, Ato mengolah mete dan cokelat menjadi penganan khas "Bumi Anoa", sebutan untuk



BACA JUGA **HLM 11 & E-PAPER C**

**(Bersambung ke hlm 15 kol 6-7)**

Title	Gurih Mete Sultra yang Melintasi Benua	 Kementerian Pertanian
Date	4 Agustus 2023	
Media	Kompas	
Page	1 Part 2	
Author	Saiful Rijal Yunus	

## Gurih Mete Sultra

(Sambungan dari halaman 1)

Sultra. Kamar itu tempat produksi cokelat metenya sejak 2017.

Jumat (28/7/2023), ia mengecek stok dan bahan yang ada. Mete yang telah diolah ditaruh di wadah plastik besar. Berkardus-kardus cokelat mentah menumpuk di dekat pintu masuk. Kemasan dan *aluminium foil* di kardus lain.

Ato membuat olahan mete setelah melihat potensi yang ada. Mete ciri khas daerahnya. Sejak kecil ia akrab dengan mete. Orangnya memiliki sepetak kebun mete, seperti warga lain di Pulau Muna, Buton, dan daerah lain di Sultra.

Saat kuliah, ia menyambi menjadi penjaga toko oleh-oleh Mubarak, salah satu pusat penjualan mete tertua dan terbesar di Kendari. Di situ, ia mulai berpikir untuk mengolah mete menjadi bentuk lain, terutama dengan cokelat.

"Belajar otodidak, akhirnya dapat komposisinya. Saya lalu berani buat dan kemas sendiri. Ternyata disukai pembeli. Akhirnya serius urus izin dan bikin produk sendiri," katanya.

Sejak saat itu, produksinya bertambah, dari 1 kilogram mete sebulan hingga 10 kilogram. Penjualannya turut meningkat dengan omzet rerata Rp 50 juta dalam sebulan. Meski pandemi Covid-19 membuatnya jungkir balik, ia kini mulai bisa bernapas lega. Pesanan meningkat.

"Terakhir ada pesanan untuk dikirim ke Madagaskar. Tapi, karena izin dan rumah produksi belum lengkap, belum bisa. Saya upayakan bisa selesai tahun ini," kata Ato.

### Bahan asli Sultra

Di pinggir Kendari, sembilan oven menyala serempak di rumah produksi olahan mete bermerek Sagumi. Enam perempuan bekerja bergantian di dapur berlantai kayu.

Muhriah (41), salah satu pekerja, memasukkan brownies mete dalam plastik kemasan, ditimbang, lalu dirapikan dengan mesin pres.

Brownies mete dibuat dengan bahan dasar sagu yang ditaburi mete. Tidak ketinggalan cokelat biji yang diolah sendiri, lalu dicampur bersama. Rasanya manis, gurih, beraroma cokelat lekat.

"Hari ini bikin biskuit sagu. Terus yang sudah jadi sejak kemarin itu brownies mete, makanya sekarang dikemas," kata Muhriah. Ia bekerja mengolah adonan, memanggang, dan mengemas panganan sejak pukul 08.00 Wita.

Hajar (49), pendiri Sagumi, mengungkapkan, dirinya mengolah panganan berbahan dasar sagu, antara lain biskuit sagu, keripik, cokelat mete, dan brownies mete. Dari keempat produk itu, brownies mete paling digemari.

Dalam sebulan, brownies mete mendominasi penjualan di atas 50 persen. Khusus biskuit dan *chips* termasuk vegan karena tidak mengandung protein hewani. "Produk kami bebas pengawet dan bebas gluten. Bahan dasar utamanya khas sini, baik sagu, mete, maupun cokelat. Sagu dari Konawe, mete dari Muna, dan cokelat dari Kolaka," katanya.

Khusus jambu mete, ia sangat memilih bahan berkualitas sebab itu menentukan rasa produk olahannya.

Provinsi Sulawesi Tenggara merupakan sentra penghasil jambu mete kedua terbesar di Indonesia. Produksi rata-rata tahunan mete di wilayah ini mencapai 37.590 ton.

Khusus untuk jambu mete, ia memilih jambu yang telah diolah sebelumnya. Meski tidak membutuhkan jambu utuh, ia tetap memilih yang terbaik. "Biar jambu mete pecah, tetapi tidak boleh rusak, ada bintik kuning atau hitam. Karena pasti rasanya beda," katanya.

Provinsi Sulawesi Tenggara, sesuai Outlook Jambu Mete Kementerian Pertanian 2022, merupakan sentra penghasil jambu mete kedua terbesar di Indonesia. Produksi jambu mete dengan kontribusi di atas 10 persen berasal dari empat kabupaten, yaitu Muna (26,59 persen), Bombana (14,71 persen), Muna Barat (13,91 persen), dan Konawe Selatan (11,54 persen). Sisanya, dari kabupaten lain.

Produksi rata-rata tahunan mete di Sultra 37.590 ton. Meski demikian, produksi tahunan terus turun. Jumlah mete yang diekspor juga hanya sebagian kecil dari ekspor Sultra. Pada 2022, ekspor mete Sultra 18 ton atau senilai 22.000 dollar AS. Total ekspor wilayah ini 2,5 juta ton yang 99 persen dikuasai hasil pengolahan nikel.

### Menjadi andalan

Koordinator Program dan Evaluasi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian Sulawesi Tenggara Assayuthi Ma'suf mengungkapkan, produk jambu mete di wilayah ini diprioritaskan menjadi andalan.


"Tetapi, dua tahun terakhir ekspornya turun. Tahun lalu itu 18 ton dan tahun sebelumnya 48 ton," katanya.

Jambu mete di wilayah ini, ujar Assayuthi, memiliki sejumlah kendala, mulai dari tanaman berusia tua, teknologi, dan intervensi pertanian yang lemah, hingga pengaruh cuaca. Akibatnya, produksi menurun beberapa tahun terakhir.

Seperti tanaman cokelat, jambu mete juga seharusnya menjadi andalan di wilayah ini. "Malah yang kami lihat meningkat itu kelapa sawit," ucapnya.

La Ato juga khawatir sebab ia tahu bahan baku jambu mete banyak didatangkan dari luar, lalu diolah di wilayah ini.

"Jangan sampai kita bilang, Sultra penghasil-mete, tetapi ternyata dari luar semua," kata ayah satu anak ini.

Title	Wamentan Harap JUT Dapat Tingkatkan Hasil Pertanian Garut Berorientasi Ekspor	 Kementerian Pertanian
Date	4 Agustus 2023	
Media	Jawa Pos	
Page	5	
Author	Als/c17/wir	

# Wamentan Harap JUT Dapat Tingkatkan Hasil Pertanian Garut Berorientasi Ekspor



GENJOT EKSPOR: Wakil Menteri Pertanian Harvick Hasnul Qolbi (kiri) menyerahkan plakat bantuan Kementerian Pertanian untuk Kabupaten Garut tahun 2023 kepada Bupati Garut Rudy Gunawan, Rabu (2/8).

Kementerian Pertanian (Kementan) merealisasikan program Jalan Usaha Tani (JUT) di sejumlah daerah di Indonesia, salah satunya di Kabupaten Garut, Jawa Barat. Program ini bertujuan untuk meningkatkan pendapatan petani.

Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Harvick Hasnul Qolbi mendorong komoditas pertanian Garut agar berorientasi ekspor sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat petani. Hal ini disampaikan setelah menyerahkan bantuan Jalan Usaha Tani (JUT) sepanjang 1,8 kilometer dari Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementerian Pertanian di Desa Cintanagara, Kecamatan Cigedug, Kabupaten Garut, Jawa Barat, pada Rabu (2/8).

"Kita telah saksikan pemberian investasi berupa Jalan Usaha Tani. Tentu saja dengan adanya ini dapat meningkatkan

hasil pertanian di Kabupaten Garut, sehingga dapat menggenjot ekspor," kata Wamentan Harvick kepada media.

Apalagi, lanjut dia, Kementerian Pertanian telah mencanangkan program Gerakan Tiga Kali Ekspor atau Gratieks yang dapat mengakselerasi ekspor pertanian, termasuk dari Garut.

Namun, Harvick berharap agar indeks pertanaman atau produktivitas pertanian di Garut pun ditingkatkan. Hal ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pangan domestik terlebih dahulu serta sebagai upaya mewujudkan kedaulatan pangan nasional. "Garut ini selain menjadi sentra jagung dan hortikultura,

potensi kopi Garut juga luar biasa. Ini harus kita dorong agar bisa berorientasi ekspor," imbuhnya.

Sementara itu, Bupati Garut Rudy Gunawan mengatakan, JUT merupakan program yang strategis untuk menggerakkan hasil-hasil produksi pertanian di wilayahnya. Selain itu, menurut Rudy, adanya JUT dapat mempermudah akses sarana dan prasarana pertanian untuk menuju lahan.

"Jadi, ini adalah yang diharapkan oleh masyarakat Garut, selain dari APBD, sehingga dapat memperluas jaringan usaha tani kita," pungkasnya. (als/c17/wir)

Kita telah saksikan pemberian investasi berupa Jalan Usaha Tani. Tentu saja dengan adanya ini dapat meningkatkan hasil pertanian di Kabupaten Garut, sehingga dapat menggenjot ekspor."

HARVICK HASNUL QOLBI  
Wakil Menteri Pertanian

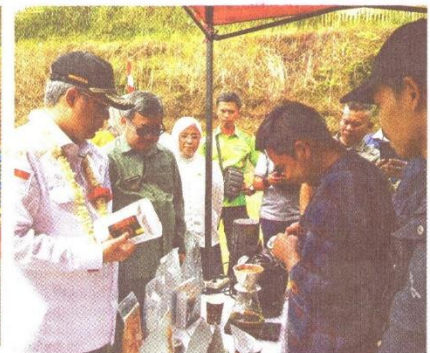


Jadi, ini adalah yang diharapkan oleh masyarakat Garut, selain dari APBD, sehingga dapat memperluas jaringan usaha tani kita."


RUDY GUNAWAN  
Bupati Garut



SINERGI: Bupati Garut Rudy Gunawan (kanan) menyerahkan cenderamata kepada Wakil Menteri Pertanian Harvick Hasnul Qolbi.



PRODUK UMKM: Wakil Menteri Pertanian Harvick Hasnul Qolbi (kiri) meninjau stan hasil pertanian Kabupaten Garut.

Title	El Nino Ganggu Produksi Beras	 Kementerian Pertanian
Date	4 Agustus 2023	
Media	Bandung Ekspres	
Page	15	
Author	Bbs	



TERGANGGU: Produksi beras terganggu hingga 1,2 juta ton. Hal ini dampak dari kondisi El Nino yang mengancam pada produksi pangan di tanah air.

ISTIMEWA/ILUSTRASI

# El Nino Ganggu Produksi Beras

## Pemerintah Catat 1,2 Juta Ton

**JAKARTA** – Produksi beras terganggu karena cuaca ekstrem atau El Nino. Pemerintah terus melakukan berbagai upaya agar ketahanan pangan tetap terjaga dan pasokan kepada masyarakat tetap aman.

Stok beras juga kini di hadapkan pada persoalan kebijakan India yang menghentikan ekspor berasnya.

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo menuturkan, persoalan ini sudah dibahas melalui rapat yang dipimpin langsung oleh Presiden Jokowi.

Dari data yang dimiliki pemerintah, cadangan beras aman hingga Desember mendatang. Namun, Kementerian kemudian melakukan kurasi dengan meneliti lebih lanjut. "Sampai September kita masih punya overstok 2,1 juta ton beras," katanya di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta.

Setiap bulan, kata dia, dari 800 ribu hektare sawah dapat menghasilkan 2 juta ton beras. Itu cukup untuk memenuhi konsumsi bulanan tanah air.

Yang dikhawatirkan justru pada kurun Oktober hingga Desember. Menurut Syahrul, tiga bulan tersebut adalah masa-masa men-

anam. Jadi, cadangan beras bisa turun.

Fenomena El Nino membuat curah hujan sedikit dan berisiko terjadi kekeringan. Kondisi itu tentu membuat produktivitas hasil pertanian menurun. "Kami akan siapkan 500 ribu hektare untukantisipasi El Nino," ucapnya.

Berdasar perkiraan, dampak El Nino bisa mengurangi produksi beras 300 ribu ton sampai 1,2 juta ton. Kekurangan produksi itu akan disiasati Kementerian. Menurut Syahrul, dalam kunjungannya ke beberapa daerah, pihaknya melihat kesiapan lahan untuk ditanami padi sebagai per-

sediaan dampak El Nino.

Sementara itu, Kepala Bulog Budi Waseso yang ditemui setelah ratas menyebutkan, pihaknya memiliki stok 1,3 juta ton beras. Untuk mencukupi pasokan, Bulog akan mendatangkan beras dari beberapa negara seperti Vietnam, Pakistan, dan Thailand. Lelang sudah dilakukan dan tinggal menunggu barang.

Di sisi lain, Suplai beras global terancam menyusul negara-negara penghasil beras nonbasmati, bahkan menghentikan eksportnya. Salah satunya, India. Sejak 20 Juli lalu, India melarang ekspor beras putih nonbasmati untuk menekan kenaikan


harga beras domestik di dalam negeri.

Selama setahun terakhir, India telah bergulat dengan inflasi pangan. Harga beras dalam negeri meningkat lebih dari 30 persen sejak Oktober lalu. Itu mengakibatkan meningkatnya tekanan politik terhadap pemerintah menjelang pemilihan umum tahun depan.

"Saya menduga bahwa tindakan untuk melarang ekspor beras nonbasmati, sebagian besar bersifat pencegahan dan mudah-mudahan ini hanya sementara," ujar Joseph Glauber dari Institut Riset Kebijakan Pangan Internasional (IFPRI). (bbs)

Dokumentasi

BIRO HUMAS DAN INFORMASI PUBLIK  
KEMANTAN

Title	Hadapi El Nino Perlu Akurasi Pupuk Subsidi	 Kementerian Pertanian
Date	4 Agustus 2023	
Media	Nusa Bali	
Page	7	
Author	Ant	

# Hadapi El Nino Perlu Akurasi Pupuk Subsidi



Syahrul Yasin Limpo

BOGOR, NusaBali

Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo ingin implementasi program pupuk bersubsidi lebih akurat dan tepat sasaran dalam menghadapi dampak El Nino.

"Masalah pupuk ini menjadi sangat penting karena ini berkait dengan produktivitas, terutama padi yang kita butuhkan, kita menghadapi climate change, hadapi El Nino, menghadapi krisis pangan dunia," ujar Mentan, Kamis (3/8).

Menurut Mentan, sejumlah permasalahan pada implementasi program pupuk bersubsidi ini menjadi konsentrasi bagi Kementan RI untuk segera dibenahi, sehingga programnya bisa berjalan lebih masif, tepat sasaran, dan akurat.

Syahrul menjelaskan, El Nino dipastikan berdampak pada sektor pertanian, karena berkaitan dengan pengairan. "Bahkan ini bagian dari climate change dan El Nino yang berujung pada krisis pangan dunia," kata Syahrul.

Namun, kata dia lagi, hingga saat ini

data Kementan RI menyatakan bahwa ketahanan pangan Indonesia dipastikan terjaga hingga Desember 2023. "Bulan ini saya masih panen 850 ribu hektare, bulan depan masih ada cadangan di atas 800 ribu hektare. Dan khusus untuk El Nino sesuai perintah Presiden, saya mempersiapkan 500 hektare untuk membooster kalau terjadi dampak dari produktivitas yang pasti menurun," katanya lagi.

Di samping itu, ia optimistis workshop yang digelar bersama Ombudsman RI dan PT Pupuk Indonesia dapat memperbaiki implementasi kebijakan pupuk bersubsidi menjadi lebih baik, cepat dan akurat.

"Ini tentu kita berharap kita menemukan sistem yang lebih akurat. Dengan demikian dari jauh-jauh hari kita sudah tahu seberapa besar orang-orang di setiap daerah yang harus tersentuh pupuk subsidi," ujarnya pula.

Dia mengingatkan, tidak semua petani berhak memperoleh pupuk bersubsidi, melainkan ada kriteria dan sejumlah persyaratan tertentu yang harus dipenuhi. **ant**

Dokumentasi

**BIRO HUMAS DAN INFORMASI PUBLIK  
KEMANTAN**

Title	Indonesia Siap Tutup Sapi Impor dari Australia	 Kementerian Pertanian
Date	4 Agustus 2023	
Media	Nusa Bali	
Page	11	
Author	Nusa Bali	

Ditemukan Virus Berbahaya

## Indonesia Siap Tutup Sapi Impor dari Australia

JAKARTA, NusaBali

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo menyatakan kesiapannya untuk menutup impor sapi jika ditemukan penyakit kulit Lumpy Skin Disease (LSD) dari Australia.

"Kalau memang dari sana sumbernya, saya enggak perlu bilang negaranya kan? Kita harus berani stop karena itu tidak boleh dimakan," kata Syahrul dikutip dari Antara, Kamis (3/8).

Penemuan virus ini diketahui saat pengecekan di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. Virus itu diyakini bersumber langsung dari peternakan Australia. Syahrul mengatakan bahwa penanganan kasus penyakit kulit LSD pada sapi serupa dengan antraks yang harus dibasmi dengan membakar dan menanam bangkai sapi yang terkena penyakit itu.

Berbeda dengan penyakit mulut dan kuku yang sejumlah bagian dapat dikonsumsi, untuk kasus penyakit LSD, manusia sama sekali tidak boleh mengonsumsi daging sapi yang terkena LSD. Oleh karena itu, pihaknya pun membentuk gugus tugas dengan mengerahkan petugas Puskesmas untuk meninjau rumah pemotongan hewan (RPH) setiap minggunya.

"Saya kira LSD (kasus) baru lagi, kita cek tapi sapi pun akan rugikan

kita, kita akan stop. Enggak boleh," kata Syahrul.

Sebelumnya Kepala Barantan Bambang menuturkan, awalnya Australia mengeksport sebanyak 9 kapal sapi dari negaranya ke Indonesia. Sayangnya dia belum bisa membeberkan berapa jumlah total sapi bakalan yang dikirim ke Tanah Air.

Kemudian ketika sampai di Indonesia, Barantan selaku otoritas Karantina Pertanian telah melakukan tindakan sesuai dengan standar prosedur impor komoditas pertanian, yakni hewan yang masuk ke wilayah NKRI akan dilakukan tindakan karantina guna memastikan kesehatan dan keamanan.

Setelah itu, petugas memberikan tanda khusus pada sapi-sapi impor yang menunjukkan gejala klinis untuk selanjutnya dilakukan pengambilan sampel sesaat setelah bongkar dari alat angkut.

Namun ternyata pada saat pengecekan di atas kapal oleh petugas Karantina Pertanian Tanjung Priok, di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta pada 25 Mei hingga 26 Juli 2023, dari hasil pemeriksaan laboratorium, ada 13 sapi yang positif terdeteksi LSD.

Menyusul itu pihaknya langsung melakukan tindakan berupa pemotongan bersyarat yang diawasi oleh

Dokter Hewan Karantina.

"Kami dapati temuan gejala klinis LSD pada sapi impor terus bertambah, karena itu kami putuskan menanggulangi importasi dari empat fasilitas tersebut," ujar Bambang saat jumpa pers.

Kemudian pihak Barantan langsung memberikan surat kepada pihak Australia untuk segera melakukan investigasi dari mana penyakit itu bersumber. Bambang menuturkan pihaknya telah memberikan tenggat waktu sebanyak 60 hari sejak 12 Juli 2023 kemarin.

"Dalam 60 hari ini kita sebenarnya tidak menutup impor jadi untuk diketahui kita tidak menutup impor tetapi menghentikan sementara untuk farm (peternak) yang kita temukan LSD. Ada 4 farm itu kita tutup dan sampai 60 hari," ujar Bambang.

Bambang melanjutkan, apabila hingga 60 hari sejak surat itu dikirimkan ternyata hasilnya positif, maka impor sapi dari negara tersebut akan diberhentikan secara total.


"Kemudian akan ada jawaban dari Australia bahwa kalau memang ternyata dikatakan di sana negatif maka akan terus dilanjutkan importasinya tapi kalau ternyata dia positif akan kita berhentikan," pungkas Bambang.



Sapi impor dari Australia dipindahkan ke dalam truk dari kapal di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Senin (29/3/2021).

Dokumentasi

**BIRO HUMAS DAN INFORMASI PUBLIK  
KEMANTAN**

Title	Kenalkan B2SA, TP PKK Gelar Lomba Cipta Non Beras dan Terigu	 Kementerian Pertanian
Date	4 Agustus 2023	
Media	Pojok Kiri	
Page	6	
Author	Khol/dy	

## Kenalkan B2SA, TP PKK Gelar Lomba Cipta Menu Non Beras dan Terigu

### Sidoarjo, Pojok Kiri

Dalam upaya mendukung program Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA) TP. PKK Kabupaten Sidoarjo bekerjasama dengan Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Sidoarjo mengadakan lomba Cipta Menu Berbahan Non Beras dan Terigu.

Ketua TP. PKK Kabupaten Sidoarjo Sa'adah Ahmad Muhdlor mengatakan dengan konsumsi pangan yang berkualitas dan beragam, dapat mengatasi masalah gizi ganda yaitu kekurangan dan kelebihan gizi yang selama ini terjadi.

"Salah satu masalah kekurangan gizi yang saat ini tengah menjadi perhatian pemerintah Kabupaten Sidoarjo adalah stunting. Stunting ini disebabkan oleh faktor multi dimensi dan tidak hanya disebabkan oleh faktor gizi buruk yang

dialami oleh anak balita maupun remaja putri, namun juga terhadap ibu hamil," ucapnya.

Ning Sasha juga menambahkan, makanan yang beragam ini juga penganekaragaman pangan ini juga mampu menciptakan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas.

"Dalam lomba ini, kami menekankan untuk pengolahan karbohidrat tidak hanya berasal dari beras saja, namun juga ada mbote, jagung, labu dan masih banyak lainnya yang perlu kita kenalkan kepada anak-anak kita," ucapnya.

Lomba Program B2SA ini bertujuan untuk mengajak masyarakat Sidoarjo lebih peduli akan gizi dan kesehatan keluarga. Setiap peserta diberi kesempatan untuk mengemukakan ide dan program kreatif yang dapat diterapkan dalam



memperkuat gizi beragam, bergizi, seimbang, dan aman di rumah tangga mereka.

"Kami sangat senang melihat antusiasme masyarakat Sidoarjo dalam mengikuti lomba ini. Semoga ide-ide kreatif dari peserta dapat menginspirasi kita semua untuk menjalankan program B2SA ini dengan serius dan berkesinambungan," tambah Ning Sasha.

Pada lomba Kreasi Masakan dengan bahan non beras dan terigu ini, mendatangkan dewan juri dari Uni-

versitas Surabaya, Dr. H Sri Handajani, S.pd. M.Kes dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo, serta dari Tim PKK Sidoarjo.

Para peserta lomba menampilkan beragam ide kreatif dan inovatif, mulai dari cara memanfaatkan lahan pekarangan untuk bertanam sayur hingga menciptakan hidangan khas berbahan pangan lokal dengan nilai gizi tinggi.

Selain lomba kreasi masakan, para peserta yang terdiri dari anggota PKK

se-Kabupaten Sidoarjo juga mengikuti lomba vlog dan lomba yel-yel program B2SA.


Dengan adanya kegiatan semacam ini, diharapkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pola makan B2SA akan semakin meningkat. Selain itu, kerjasama antara TP.PKK Kabupaten Sidoarjo dan Dinas Pertanian menjadi contoh sinergi positif dalam upaya mencapai gizi yang lebih baik dan kesejahteraan keluarga di Kabupaten Sidoarjo. (Khol/dy)

### BERIKUT PEMENANG LOMBA CIPTA MENU

Juara 1	Nomor urut 15	dari Kecamatan Sedati
Juara 2	Nomor urut 5	dari Kecamatan Wonoayu
Juara 3	Nomor urut 10	dari Kecamatan Taman
Juara 4	Nomor urut 2	dari Kecamatan Candi

Dokumentasi

**BIRO HUMAS DAN INFORMASI PUBLIK  
KEMANTAN**

Title	Ketersediaan Beras Nasional Cukup Hingga September	 Kementerian Pertanian
Date	4 Agustus 2023	
Media	Radar Garut	
Page	1	
Author	Dis	

# Ketersediaan Beras Nasional Cukup Hingga September

**JAKARTA** - Ketersediaan beras nasional dipastikan cukup baik hingga bulan September 2023. Kepastian tersebut disampaikan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (YSL), dalam keterangan persnya.

“Sampai September kita masih punya overstock di atas 2,7 juta (ton). Artinya, dari setiap bulan masih ada panen di atas 800 ribu hektare,

itu menghasilkan cukup untuk kebutuhan kita setiap bulannya di atas 2 jutaan,” ungkap Mentan YSL.

Ia juga mengungkapkan, Presiden Jokowi meminta jajaran untuk mempersiapkan dan memastikan ketersediaan beras nasional dalam menghadapi fenomena El Nino yang memicu kekeringan dan menurunnya produktivitas pertanian.

“Kita akan mempersiapkan kurang lebih 500 ribu hektare untukantisipasi El Nino. Walaupun dalam kenyataan sampai hari ini tentang El Nino dan lain-lain sebagainya yang digambarkan akan panas dan lain-lain, saya habis cek beberapa waduk-waduk dan dam kita yang besar, ternyata airnya cukup,” kata SYL.


Mentan pun mengharapkan pemerintah daerah turut mempersiapkan diri dalam menghadapi El Nino.

“Ada enam daerah, itu antara lain dan yang utama itu mulai dari Sumatera Utara, Sumatera Selatan, tiga Jawa, ditambah dengan Sulawesi Selatan, jadi enam. Kemudian ada penyangganya adalah Kalimantan Selatan, NTB [Nusa Tenggara Barat], Banten, dan Lampung. Saya yakin kalau ini bisa bergerak 500 ribu hektare, shorted atau kemungkinan imbas dari El Nino itu kita bisa kendalikan dengan baik,” tandasnya. (dis)



ISTIMEWA

**AMAN.** Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (YSL), dalam keterangan persnya menyatakan ketersediaan beras nasional dipastikan cukup baik hingga bulan September 2023.

Title	El Nino Ganggu Produksi Beras hingga 1,2 Juta Ton	 Kementerian Pertanian
Date	4 Agustus 2023	
Media	Fajar Makassar	
Page	14	
Author	Ardiansyah Hendartin	

# El Nino Ganggu Produksi Beras hingga 1,2 Juta Ton

EDITOR ARDIANSYAH HENDARTIN

**JAKARTA, FAJAR — Pemerintah berupaya memastikan ketersediaan beras dalam negeri. Selain fenomena El Nino bisa berdampak pada pasokan pangan, kebijakan India yang menghentikan ekspor beras turut diantisipasi. Presiden Joko Widodo bahkan juga telah menggelar rapat terbatas (ratas) dengan para menteri untuk membahas secara khusus persoalan tersebut.**

**MENTERI** Pertanian Syahrul Yasin Limpo menjelaskan, melalui rapat itu, presiden ingin mengecek ketersediaan dan keterjangkauan beras dalam negeri.

Dari data yang dimiliki pemerintah, cadangan beras aman hingga Desember mendatang. Namun, Kementerian kemudian melakukan kurasi dengan meneliti lebih lanjut. "Sampai September kita masih punya overstok 2,1 juta ton beras," katanya di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta.

Setiap bulan, kata dia, dari 800 ribu hektare sawah dapat menghasilkan 2 juta ton beras. Itu cukup untuk memenuhi konsumsi bulanan tanah air. Yang dikhawatirkan justru pada kurun Oktober hingga Desember. Menurut Syahrul, tiga bulan tersebut adalah masa-masa menanam. Jadi, cadangan beras bisa turun.

Fenomena El Nino membuat curah hujan sedikit dan berisiko terjadi kekeringan. Kondisi itu tentu membuat produktivitas hasil pertanian menurun. "Kami akan siapkan 500 ribu hektare untukantisipasi El Nino," ucapnya.

Berdasar perkiraan, dampak El Nino bisa mengurangi produksi beras 300 ribu ton sampai 1,2 juta ton. Kekurangan produksi itu akan disiasati Kementan. Menurut Syahrul, dalam kunjungannya ke beberapa daerah, pihaknya melihat kesiapan lahan untuk ditanami padi sebagai persediaan dampak El Nino.

Sementara itu, Kepala Bulog Budi Waseso yang ditemui setelah ratas menyebutkan, pihaknya memiliki stok 1,3 juta ton beras. Untuk mencukupi pasokan, Bulog akan mendatangkan be-

ras dari beberapa negara seperti Vietnam, Pakistan, dan Thailand. Lelang sudah dilakukan dan tinggal menunggu barang.

Di sisi lain, Suplai beras global terancam menyusul negara-negara penghasil membatasi, bahkan menghentikan eksportnya. Salah satunya, India. Sejak 20 Juli lalu, India melarang ekspor beras putih nonbasmati untuk menekan kenaikan harga beras domestik di dalam negeri.

Selama setahun terakhir, India telah bergulat dengan inflasi pangan. Harga beras dalam negeri meningkat lebih dari 30 persen sejak Oktober lalu. Itu mengakibatkan meningkatnya tekanan politik terhadap pemerintah menjelang pemilihan umum tahun depan.


"Saya menduga bahwa tindakan untuk melarang ekspor beras nonbasmati, sebagian besar bersifat pencegahan dan mudah-mudahan inih hanya sementara," ujar Joseph Glauber dari Institut Riset Kebijakan Pangan Internasional (IFPRI).

India adalah pengeksport beras utama dunia. Tahun lalu mereka menyumbang sekitar 40 persen dari perdagangan global yang mencapai total 55,4 juta metrik ton. Dari jumlah itu, sebanyak 22,2 juta metrik ton berasal dari India. Jauh lebih banyak dibandingkan pengiriman gabungan empat negara pengeksport utama lainnya, yaitu Thailand, Vietnam, Pakistan, dan AS.

Tahun lalu India mengeksport 22,2 juta ton besar ke 140 negara. Dari jumlah itu, sekitar 6 juta ton adalah beras putih India yang relatif lebih murah. Beras putih India mendominasi sekitar 70 persen perdagangan global. (\*)

Dokumentasi

**BIRO HUMAS DAN INFORMASI PUBLIK  
KEMENTAN**

Title	Harus Tepat Sasaran	 Kementerian Pertanian
Date	4 Agustus 2023	
Media	Koran Gala	
Page	8	
Author	Antara	

# Harus Tepat Sasaran

## Ombudsman Temukan Sejumlah Permasalahan dalam Program Pupuk Bersubsidi

### BOGOR, (KG),-

Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo ingin implementasi program pupuk bersubsidi lebih akurat dan tepat sasaran dalam menghadapi dampak El Nino.

"Masalah pupuk ini menjadi sangat penting karena ini berkait dengan produktivitas, terutama padi yang kita butuhkan, kita menghadapi climate change, hadapi El Nino, menghadapi krisis pangan dunia," ujar Mentan Syahrul dalam workshop "Transformasi Kebijakan Pupuk Bersubsidi" di Babakanmadang, Kabupaten Bogor, Kamis (3/8).

Menurut Mentan, sejumlah permasalahan pada implementasi program pupuk bersubsidi ini menjadi konsentrasi bagi Kementan RI untuk segera dibenahi, sehingga programnya bisa berjalan lebih masif, tepat sasaran, dan akurat.

Syahrul menjelaskan, El Nino dipastikan berdampak pada sektor per-

tanian, karena berkaitan dengan pengairan. "Bahkan ini bagian dari climate change dan El Nino yang berujung pada krisis pangan dunia," kata Syahrul.

Namun, kata dia lagi, hingga saat ini data Kementan RI menyatakan bahwa ketahanan pangan Indonesia dipastikan terjaga hingga Desember 2023.

"Bulan ini saya masih panen 850 ribu hektare, bulan depan masih ada cadangan di atas 800 ribu hektare. Dan khusus untuk El Nino sesuai perintah Presiden, saya mempersiapkan 500 hektare untuk membooster kalau terjadi dampak dari produktivitas yang pasti menurun," katanya lagi.

Di samping itu, ia optimistis workshop yang digelar bersama Ombudsman RI dan PT Pupuk Indonesia dapat

memperbaiki implementasi kebijakan pupuk bersubsidi menjadi lebih baik, cepat dan akurat.

"Ini tentu kita berharap kita menemukan sistem yang lebih akurat. Dengan demikian dari jauh-jauh hari kita sudah tahu seberapa besar orang-orang di setiap daerah yang harus tersentuh pupuk subsidi," ujarnya pula.

Dia mengingatkan, tidak semua petani berhak memperoleh pupuk bersubsidi, melainkan ada kriteria dan sejumlah persyaratan tertentu yang harus dipenuhi.

### Permasalahan

Ombudsman RI menemukan sejumlah permasalahan dalam kebijakan program pupuk bersubsidi yang melibatkan Kementerian Pertanian (Kementan) dan PT Pupuk Indonesia.

"Permasalahan pokok dalam kebijakan pupuk bersubsidi berdasarkan hasil kajian dan investigasi," kata Wakil Ketua Ombudsman RI Bobby Hamzar Rafinus saat memberi sambutan dalam workshop "Transformasi Kebijakan Pupuk Bersubsidi", di

Babakanmadang, Kabupaten Bogor, Kamis (3/8).


Ombudsman RI mencatat lima poin permasalahan pokok dalam kebijakan program pupuk bersubsidi. Pertama, yaitu mengenai tujuan kebijakan pupuk bersubsidi yang dinilai belum jelas dan tepat tujuan.

Kedua, kata dia lagi, permasalahan kriteria petani penerima pupuk bersubsidi yang dinilai belum jelas dan tepat sasaran. Ketiga, pendataan yang tidak kunjung menghadirkan data yang akurat.

Keempat, permasalahan penyaluran yang kerap memunculkan isu tidak tepat sasaran, kurang dan langka. Kelima, permasalahan desain perencanaan anggaran yang tidak merata pada setiap dukungan program pupuk bersubsidi. Bobby mengatakan, Ombudsman RI memberikan perhatian secara khusus guna mendorong perbaikan dan transformasi dalam kebijakan pupuk bersubsidi, salah satunya melalui workshop tersebut. **(Antara)\*\***

Dokumentasi

**BIRO HUMAS DAN INFORMASI PUBLIK  
KEMENTAN**

Title	Ombudsman RI Temukan Sejumlah Masalah	 Kementerian Pertanian
Date	4 Agustus 2023	
Media	Kedaulatan Rakyat	
Page	1 Part 1	
Author	Ant/San-d	

## Kebijakan Pupuk Bersubsidi

# Ombudsman RI Temukan Sejumlah Masalah

**BOGOR (KR)** - Ombudsman RI menemukan sejumlah permasalahan dalam kebijakan Program Pupuk Bersubsidi yang melibatkan Kementerian Pertanian (Kementan) dan PT Pupuk Indonesia.


"Permasalahan pokok dalam kebijakan pupuk bersubsidi berdasarkan hasil kajian dan investigasi," kata Wakil Ketua Ombudsman RI Bobby Hamzar Rafinus dalam Workshop Transformasi Kebijakan Pupuk Bersubsidi, di Babakanmadang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Kamis (3/8).

Menurut Bobby, Ombudsman RI mencatat lima poin permasalahan pokok dalam kebijakan Program Pupuk Bersubsidi. Pertama, mengenai tujuan kebijakan pupuk bersubsidi yang dinilai belum jelas dan tepat tujuan. Kedua, permasalahan kriteria petani penerima pupuk bersubsidi yang dinilai belum jelas dan tepat sasaran. Ketiga, pendataan yang tidak kunjung menghadirkan data yang akurat. Keempat, permasalahan penyuluhan yang kerap memunculkan isu tidak tepat sasaran, kurang dan langka. Kelima, permasalahan desain perencanaan anggaran yang tidak merata pada setiap dukungan program pupuk bersubsidi.

Bobby mengatakan, Ombudsman RI memberikan perhatian secara khusus guna mendorong perbaikan dan transformasi dalam kebijakan pupuk bersubsidi, salah satunya melalui workshop tersebut. "Hal ini dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan pemerintah terhadap publik di sektor pertanian," kata Bobby.

Menurutnya, kegiatan workshop ini akan menjadi momentum yang penting bagi instansi-instansi yang terlibat untuk mendorong perbaikan dan transformasi kebijakan pupuk bersubsidi. "Tentunya menjadi harapan bagi kita semua, semoga tata kelola pupuk bersubsidi semakin lebih baik ke depannya dan petani kecil di Indonesia mendapat perlindungan atas hak-haknya dalam memperoleh pupuk bersubsidi," ujarnya.

**\* Bersambung hal 8 kol 5**

Title	Ombudsman RI Temukan Sejumlah Masalah	 Kementerian Pertanian
Date	4 Agustus 2023	
Media	Kedaulatan Rakyat	
Page	1 Part 2	
Author	Ant/San-d	


## Ombudsman ..... Sambungan hal 1

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo optimistis workshop yang digelar bersama Ombudsman RI dan PT Pupuk Indonesia dapat memperbaiki implementasi kebijakan pupuk bersubsidi menjadi lebih baik, cepat dan akurat. "Ini tentu kita berharap menemukan sistem yang lebih akurat. Dengan demikian dari jauh-

jauh hari kita sudah tahu seberapa besar orang-orang di setiap daerah yang harus tersentuh pupuk subsidi," ujarnya.

Bobby mengingatkan, tidak semua petani berhak memperoleh pupuk bersubsidi, melainkan ada kriteria dan sejumlah persyaratan tertentu.

(Ant/San)-d

Title	Ombudsmen RI Ungkap Berbagai Pemasalahan Pupuk Bersubsidi	 Kementerian Pertanian
Date	4 Agustus 2023	
Media	Lentera	
Page	4	
Author	Lut/dya	

# Ombudsmen RI Ungkap Berbagai Pemasalahan Pupuk Bersubsidi

**JAKARTA** – Menyikapi pemasalahan pupuk bersubsidi yang masih menjadi keluhan para petani, Ombudsman RI menggelar workshop bertema 'Transformasi Kebijakan Subsidi Pupuk' bersama Kementerian Pertanian di Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Kamis (3/7/2023).

Hasilnya Ombudsmen RI menemukan sejumlah permasalahan dalam kebijakan program pupuk bersubsidi yang melibatkan Kementerian Pertanian (Kementan) dan PT Pupuk Indonesia. Ada 5 poin utama yang diungkap. Selain itu juga ada Ombudsme WI Jati, sering mendapatkan keluhan masyarakat terkait kelangkaan pupuk bersubsidi

"Permasalahan pokok dalam kebijakan pupuk bersubsidi berdasarkan hasil kajian dan investigasi," kata Wakil Ketua Ombudsman RI Bobby Hamzar Rafinus saat memberi sambutan dalam workshop "Transformasi Kebijakan Pupuk Bersubsidi," di Babakanmadang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, dikutip dari antara, Kamis (3/8/2023).

Ombudsman RI mencatat lima poin permasalahan pokok dalam kebijakan program pupuk bersubsidi. Pertama, yaitu mengenai tujuan kebijakan pupuk bersubsidi yang dinilai belum jelas dan tepat tujuan.

Kedua, kata dia lagi, permasalahan kriteria petani penerima pupuk bersubsidi yang dinilai belum jelas dan tepat sasaran. Ketiga, pendataan yang tidak kunjung menghadirkan data yang akurat.

Keempat, permasalahan penyaluran yang kerap memunculkan isu tidak tepat sasaran, kurang dan langka. Kelima, permasalahan desain perencanaan anggaran yang tidak merata pada setiap dukungan program pupuk bersubsidi.

Bobby mengatakan, Ombudsman RI memberikan perhatian secara khusus guna mendorong perbaikan dan transformasi dalam kebijakan pupuk bersubsidi, salah satunya melalui workshop tersebut.

"Hal ini dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan pemerintah terhadap publik di sektor pertanian," kata Bobby.

Menurut dia, kegiatan workshop itu akan menjadi momentum yang penting bagi instansi-instansi yang terlibat untuk mendorong perbaikan dan transformasi kebijakan pupuk bersubsidi.

"Tentunya menjadi harapan bagi kita semua, semoga tata kelola pupuk bersubsidi semakin lebih baik ke depannya dan petani kecil di Indonesia mendapat perlindungan atas hak-haknya dalam memperoleh pupuk bersubsidi," ujarnya pula.

Bobby juga mengatakan bahwa Ombudsman melakukan pengawasan terhadap distribusi pupuk bersubsidi. Menurutnya, pengawasan itu



Wakil Ketua Ombudsman RI, Bobby Hamzar Rafinus (Rizky/detikcom)

dilakukan hingga tingkat kota/kabupaten.

"Karena peredaran pupuk bersubsidi ini melibatkan berbagai pihak. Tidak hanya BUMN, tapi juga para masyarakat yang masuk ke dalam lini perdagangan distribusinya," kata Bobby.

Dia menandakan bahwa pihaknya terus menampung masukan dan aduan dari masyarakat terkait peredaran pupuk bersubsidi. Hingga kini, kata dia, Ombudsman masih terus menerima laporan terkait kelangkaan pupuk subsidi.

"Kami dalam beberapa kesempatan masih menerima laporan dari masyarakat terkait dengan kelangkaan yang terjadi. Melalui peredaran pupuk bersubsidi ini, mudah-mudahan kita akan terus mendapat data semakin akurat," ucapnya.

Anggota Ombudsman RI, Yeka Hendra, mengatakan pengawasan peredaran pupuk subsidi dilakukan melalui dua kegiatan. Yaitu percepatan administrasi dan mitigasi kelangkaan. "Pertama 2021 kami melakukan percepatan administrasi dengan memetakan semua persoalan pupuk bersubsidi dari hulu ke hilir. Kedua kami melakukan mitigasi atas kelangkaan pupuk bersubsidi," ujarnya.

Dia menyebut Ombudsman banyak menerima laporan terkait kelangkaan pupuk bersubsidi dari para petani. Namun karena beberapa persyaratan belum terpenuhi, pihaknya tetap perlu melakukan investigasi.

"Yang melaporkan itu banyak, tapi karena yang melaporkan itu para petani kita dan mereka susah memberikan laporan secara persyaratan formulir materinya tidak bisa dipenuhi, jadi membuat kami harus aktif untuk melakukan investigasi tersebut," katanya.

Sementara itu, Mentan Syahrul mengatakan masalah pupuk subsidi menjadi hal penting. Sebab, kata dia, upacara berkaitan dengan produksi

pangan, terutama padi. "Kita menghadapi climate change, El Nino, menghadapi krisis pangan dunia. Oleh karena itu, masalah pupuk menjadi salah satu sandaran kita agar bisa berjalan lebih masif, lebih tepat, dan lebih akurat di lapangan," imbuh Syahrul.

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo di tempat yang sama optimistis workshop yang digelar bersama Ombudsman dan PT Pupuk Indonesia dapat memperbaiki implementasi kebijakan pupuk bersubsidi menjadi lebih baik, cepat dan akurat.

"Ini tentu kita berharap menemukan sistem yang lebih akurat. Dengan demikian dari jauh-jauh hari kita sudah tahu seberapa besar orang-orang di setiap daerah yang harus tersentuh pupuk subsidi," ujar dia lagi.

Dia mengingatkan, tidak semua petani berhak memperoleh pupuk bersubsidi, melainkan ada kriteria dan sejumlah persyaratan tertentu.

"Pupuk itu penting dalam meningkatkan produktivitas pertanian. Akses petani terhadap pupuk jangan sampai dibikin rumit," ungkapnya dikutip dari laman kementan.

Ia menyebutkan, pembenahan distribusi pupuk perlu dilakukan dengan cepat. Dia juga menginginkan standar operasional prosedur (SOP) diperkuat sehingga mekanisme distribusinya bisa lebih baik. "Mari kita perbaiki SOP sehingga akses pupuk bisa lebih merata. Ingat di sini ada kepentingan petani," ungkapnya dalam siaran pers.

Syahrul juga menjelaskan, digitalisasi sangat penting dalam pengawasan dan pendataan penerima pupuk, terutama dalam meningkatkan efektivitas distribusi pupuk. "Sekarang ini zamannya digital. Seharusnya kita bisa memanfaatkan sehingga pupuk subsidi bisa diterima sesuai sasarannya," sebutnya.

Terkait transformasi kebijakan

subsidi pupuk, SYL mengingatkan semua pihak untuk berhati-hati. "Kita harus pelan-pelan. Mengurusi pertanian tidak semudah itu. Apalagi ini nasib petani. Kita tidak boleh main-main," tegasnya.

Syahrul juga mengingatkan, banyak pihak yang terlibat dalam distribusi pupuk sehingga kerja tim harus dikedepankan. "Semua pihak yang terlibat harus memiliki team work. Kita harus menjaga akuntabilitas dengan menggunakan cara-cara yang cepat, cermat, dan akurat," jelasnya. (lut/dya)



**Permasalahan pokok dalam kebijakan pupuk bersubsidi berdasarkan hasil kajian dan investigasi, Transformasi Kebijakan Pupuk Bersubsidi,"**


**BOBBY HAMZAR RAFINUS**

Wakil Ketua Ombudsman RI



Dokumentasi

**BIRO HUMAS DAN INFORMASI PUBLIK KEMANTAN**

Title	Temukan Sejumlah Masalah Kebijakan Pupuk Bersubsidi	 Kementerian Pertanian
Date	4 Agustus 2023	
Media	Jambi Independent	
Page	1 Part 1	
Author	Antara	

## Temukan Sejumlah Masalah Kebijakan Pupuk Bersubsidi

**BOGOR**- Ombudsman RI menemukan sejumlah permasalahan dalam kebijakan program pupuk bersubsidi yang melibatkan Kementerian Pertanian (Kementan) dan PT Pupuk Indonesia.


"Permasalahan pokok dalam kebijakan pupuk bersubsidi berdasarkan hasil kajian dan investigasi," kata Wakil Ketua Ombudsman RI Bobby Hamzar Rafinus saat memberi sambutan dalam workshop "Transformasi Kebijakan Pupuk Bersubsidi", di Babakanmadang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Kamis. ■



ANTARAM FIKRI SEDIWAN

**Bobby Hamzar Rafinus**

Baca **Temukan** hal 2

Title	Temukan Sejumlah Masalah Kebijakan Pupuk Bersubsidi	 Kementerian Pertanian
Date	4 Agustus 2023	
Media	Jambi Independent	
Page	1 Part 2	
Author	Antara	

## Temukan Sejumlah Masalah Kebijakan -----dari hal 1

Ombudsman RI mencatat lima poin permasalahan pokok dalam kebijakan program pupuk bersubsidi. Pertama, yaitu mengenai tujuan kebijakan pupuk bersubsidi yang dinilai belum jelas dan tepat tujuan.

Kedua, kata dia lagi, permasalahan kriteria petani penerima pupuk bersubsidi yang dinilai belum jelas dan tepat sasaran. Ketiga, pendataan yang tidak kunjung menghadirkan data yang akurat.

Keempat, permasalahan penyaluran yang kerap memunculkan isu tidak tepat sasaran, kurang dan langka. Kelima, permasalahan desain perencanaan anggaran yang tidak merata pada setiap dukungan program pupuk bersubsidi.

Bobby mengatakan, Ombudsman RI memberikan

perhatian secara khusus guna mendorong perbaikan dan transformasi dalam kebijakan pupuk bersubsidi, salah satunya melalui workshop tersebut.

"Hal ini dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan pemerintah terhadap publik di sektor pertanian," kata Bobby.

Menurut dia, kegiatan workshop itu akan menjadi momentum yang penting bagi instansi-instansi yang terlibat untuk mendorong perbaikan dan transformasi kebijakan pupuk bersubsidi.

"Tentunya menjadi harapan bagi kita semua, semoga tata kelola pupuk bersubsidi semakin lebih baik ke depannya dan petani kecil di Indonesia mendapat perlindungan atas hak-haknya dalam memperoleh

pupuk bersubsidi," ujarnya pula.

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo di tempat yang sama optimistis workshop yang digelar bersama Ombudsman dan PT Pupuk Indonesia dapat memperbaiki implementasi kebijakan pupuk bersubsidi menjadi lebih baik, cepat dan akurat.

"Ini tentu kita berharap menemukan sistem yang lebih akurat. Dengan demikian dari jauh-jauh hari kita sudah tahu seberapa besar orang-orang di setiap daerah yang harus tersentuh pupuk subsidi," ujar dia lagi.

Dia mengingatkan, tidak semua petani berhak memperoleh pupuk bersubsidi, melainkan ada kriteria dan sejumlah persyaratan tertentu. (ANTARA)

Title	El Nino Kurangi Produksi Beras
Date	4 Agustus 2023
Media	Radar Bogor
Page	2
Author	Jp



# El Nino Kurangi Produksi Beras

Dari 300 ribu ton hingga 1,2 Juta Ton

JAKARTA-Pemerintah berupaya memastikan ketersediaan beras dalam negeri. Selain fenomena El Nino bisa berdampak pada pasokan pangan, kebijakan India yang menghentikan ekspor beras turut diantisipasi. Rabu (2/8), Presiden Joko Widodo menggelar rapat terbatas (ratas) dengan para menteri untuk membahas secara khusus persoalan tersebut.

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo menjelaskan, melalui rapat itu, presiden ingin mengecek ketersediaan dan keterjangkauan beras dalam negeri. Dari data yang dimiliki pemerintah, cadangan beras aman hingga Desember mendatang. Namun, Kementerian kemudian melakukan kurasi dengan meneliti lebih lanjut. "Sampai September kita masih punya overstock 2,1 juta ton beras," kata dia di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta.

Setiap bulan, kata dia, dari 800 ribu hektare sawah dapat menghasilkan dua juta ton beras. Itu cukup untuk memenuhi konsumsi bulanan tanah air. Yang dikhawatirkan justru pada kurun Oktober hingga Desember. Menurut Syahrul, tiga bulan tersebut adalah masa-masa menanam. Jadi, cadangan beras bisa turun.

Fenomena El Nino membuat curah hujan sedikit dan berisiko terjadi kekeringan. Kondisi itu tentu membuat produktivitas hasil pertanian menurun. "Kami akan siapkan 500 ribu hektare untuk antisipasi El Nino," ucapnya.

Berdasar perkiraan, dampak El Nino bisa mengurangi produksi beras 300 ribu ton sampai 1,2 juta ton. Kekurangan produksi itu akan disiasati Kementerian. Menurut Syahrul, dalam kunjungannya ke beberapa daerah, pihaknya melihat kesiapan lahan untuk ditanami padi sebagai persediaan dampak El Nino.

Sementara itu, Kepala Bulog Budi Waseso yang ditemui setelah ratas menyebutkan, pihaknya memiliki stok 1,3 juta ton beras. Untuk mencukupi pasokan, Bulog akan mendatangkan beras dari beberapa negara seperti Vietnam, Pakistan, dan Thailand. Lelang sudah dilakukan dan tinggal menunggu barang.

Di sisi lain, Suplai beras global terancam

**Stok Beras Nasional**

- **Stok hingga September:** 2,1 juta ton
- **Stok beras Bulog:** 1,3 juta tons
- **Per bulan, atau 800 ribu hektar sawah menghasilkan:** 2 juta ton beras
- **Oktober-November:** Masa menanam (cadangan beras berkurang)

**Pengaruh El Nino:**  
Curah hujan sedikit, berisiko terjadi kekeringan, sehingga produktivitas hasil pertanian menurun dari 300 ribu ton hingga 1,2 juta ton

**Antisipasi El Nino**

- Siapkan 500 ribu hektare lahan
- Impor beras dari Vietnam, Pakistan, Thailand karena India menutup keran ekspor.

menyusul negara-negara penghasil membatasi, bahkan menghentikan eksportnya. Salah satunya, India. Sejak 20 Juli lalu, India melarang ekspor beras putih nonbasmati untuk menekan kenaikan harga beras domestik di dalam negeri. Selama setahun terakhir, India telah bergulat dengan inflasi pangan. Harga beras dalam negeri meningkat lebih dari 30 persen sejak Oktober lalu. Itu mengakibatkan meningkatnya tekanan politik terhadap pemerintah menjelang pemilihan umum tahun depan.


"Saya menduga bahwa tindakan untuk melarang ekspor beras nonbasmati, sebagian besar bersifat pencegahan dan mudah-mudahan ini hanya sementara," ujar Joseph Glauber dari Institut Riset Kebijakan Pangan Internasional (IFPRI).

India adalah pengeksport beras utama dunia. Tahun lalu mereka menyumbang sekitar 40 persen dari perdagangan global yang mencapai total 55,4 juta metrik ton. Dari jumlah itu, sebanyak 22,2 juta metrik ton berasal dari India. Jauh lebih banyak dibandingkan pengiriman gabungan empat negara pengeksport utama lainnya, yaitu Thailand, Vietnam, Pakistan, dan AS.

Tahun lalu India mengeksport 22,2 juta ton besar ke 140 negara. Dari jumlah itu, sekitar 6 juta ton adalah beras putih India yang relatif lebih murah. Beras putih India mendominasi sekitar 70 persen perdagangan global. Karena itulah, keputusan penghentian ekspor beras India menimbulkan kepanikan di negara-negara pengimpor. (jp)

Dokumentasi

**BIRO HUMAS DAN INFORMASI PUBLIK  
KEMANTAN**


Title	PT Pupuk Indonesia Ancam Distributor Nakal	 Kementerian Pertanian
Date	4 Agustus 2023	
Media	Radar Banten	
Page	1 Part 1	
Author	Suf/nda	

# PT Pupuk Indonesia Ancam Distributor Nakal

PT Pupuk Indonesia (Persero) tengah meningkatkan pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ini tidak segan memutus kerja sama dengan para distributor nakal.

VP Penjualan Wilayah 3A Pupuk Indonesia Aviv Ahmad Fadhil mengatakan, pihaknya terus berkoordinasi dengan seluruh aparat penegak hukum untuk meningkatkan pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi.

▶ *Ke halaman 7*

Title	PT Pupuk Indonesia Ancam Distributor Nakal	 Kementerian Pertanian
Date	4 Agustus 2023	
Media	Radar Banten	
Page	1 Part 2	
Author	Suf/nda	

## PT Pupuk...

Sebagai BUMN yang diberi mandat oleh Pemerintah untuk menyalurkan pupuk bersubsidi kepada para kelompok tani, PT Pupuk Indonesia tidak segan memutus kerja sama ke distributor jika terbukti menyelewengkannya. Sebab, pupuk bersubsidi merupakan program pemerintah yang ditunjukkan untuk para petani dalam rangka meningkatkan kinerja sektor pertanian terutama subsektor tanaman pangan.

“Pupuk Indonesia siap menindak tegas apabila ada distributor dan kios resmi yang terlibat dan terbukti menyalurkan pupuk bersubsidi di luar ketentuan pemerintah. Karena pupuk bersubsidi merupakan barang dalam pengawasan pemerintah sehingga peredarannya dipantau oleh aparat penegak hukum mulai dari dari Kepolisian, Kejaksaan, TNI hingga Pemerintah Daerah (Pemda),” kata Aviv, kemarin.

Dia mengimbau kepada seluruh jaringan distribusi seperti distributor dan kios resmi di seluruh Indonesia untuk tidak coba-coba melakukan tindakan melawan hukum, khususnya dalam proses pendistribusian atau penyaluran pupuk bersubsidi. “Kita ingin pupuk subsidi ini benar-benar menyasar para kelompok tani secara tepat sasaran, guna membantu tani sehingga dapat membantu para petani guna meningkatkan sektor pertanian,” katanya.

Aviv pun mengapresiasi keberhasilan Polres Pandeglang membongkar kasus penyalahgunaan 25 ton pupuk bersubsidi beberapa waktu lalu. “Pupuk Indonesia mengapresiasi langkah aparat penegak hukum khususnya Kepolisian Republik Indonesia yang berhasil menangkap empat orang pelaku penyelewengan pupuk bersubsidi di Pandeglang, Banten,” ungkap Aviv.

Diketahui, Polres Pandeglang membongkar empat orang aktor utama penyalahgunaan pupuk bersubsidi di Pan-

## Dari hlm 1

deglang. Polisi juga mengamankan 25 ton pupuk bersubsidi jenis Urea dan NPK Phonska.

Empat tersangka itu adalah AH (petani pekebun), JI (buruh harian lepas) HJ (wiraswasta), dan JP (wiraswasta) yang sama-sama warga Kabupaten Pandeglang. Polisi juga tengah memburu empat orang lainnya berinisial Us (Garut) SO, AR dan HT.


Kapolres Pandeglang, AKBP Belny Warlansyah mengatakan, pupuk bersubsidi yang peruntukannya di Kabupaten Pandeglang, telah dijual dan dikirim pelaku ke kabupaten dan kota yang berbeda.

“Yakni di Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Jawa Tengah. Ke Kabupaten Garut dan Blora,” katanya, beberapa waktu lalu.

Selain itu, pupuk bersubsidi yang seharusnya dikirim kepada petani di wilayah Pandeglang, malah dikirim ke Kabupaten Garut dan Grobogan.

“Total penyalahgunaan tiga kejadian itu sebanyak 38 ton pupuk bersubsidi sudah dikirim ke luar daerah. Dan sebanyak 25 ton pengirimannya dapat digagalkan,” katanya.

Keempat tersangka dijerat dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan dan atau Pasal 6 ayat 1 huruf b dan/atau c Jo Pasal 1 sub 1e dan sub 3e Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi Jo Pasal 34 ayat (2) dan/atau ayat (3) Permendag RI Nomor 04 Tahun 2023 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Jo Pasal 4, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 14 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata cara Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian. “Dengan ancaman pidana di atas lima tahun dan denda Rp5 miliar,” katanya. (suf/nda)


Title	PT Pupuk Indonesia Ancam Distributor Nakal	 Kementerian Pertanian
Date	4 Agustus 2023	
Media	Radar Banten	
Page	1 Part 1	
Author	Suf/nda	

# PT Pupuk Indonesia Ancam Distributor Nakal

PT Pupuk Indonesia (Persero) tengah meningkatkan pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ini tidak segan memutus kerja sama dengan para distributor nakal.

VP Penjualan Wilayah 3A Pupuk Indonesia Aviv Ahmad Fadhil mengatakan, pihaknya terus berkoordinasi dengan seluruh aparat penegak hukum untuk meningkatkan pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi.

▶ *Ke halaman 7*

Title	PT Pupuk Indonesia Ancam Distributor Nakal	 Kementerian Pertanian
Date	4 Agustus 2023	
Media	Radar Banten	
Page	1 Part 2	
Author	Suf/nda	

## PT Pupuk...

Sebagai BUMN yang diberi mandat oleh Pemerintah untuk menyalurkan pupuk bersubsidi kepada para kelompok tani, PT Pupuk Indonesia tidak segan memutus kerja sama ke distributor jika terbukti menyelewengkannya. Sebab, pupuk bersubsidi merupakan program pemerintah yang ditunjukkan untuk para petani dalam rangka meningkatkan kinerja sektor pertanian terutama subsektor tanaman pangan.

“Pupuk Indonesia siap menindak tegas apabila ada distributor dan kios resmi yang terlibat dan terbukti menyalurkan pupuk bersubsidi di luar ketentuan pemerintah. Karena pupuk bersubsidi merupakan barang dalam pengawasan pemerintah sehingga peredarannya dipantau oleh aparat penegak hukum mulai dari dari Kepolisian, Kejaksaan, TNI hingga Pemerintah Daerah (Pemda),” kata Aviv, kemarin.

Dia mengimbau kepada seluruh jaringan distribusi seperti distributor dan kios resmi di seluruh Indonesia untuk tidak coba-coba melakukan tindakan melawan hukum, khususnya dalam proses pendistribusian atau penyaluran pupuk bersubsidi. “Kita ingin pupuk subsidi ini benar-benar menysasar para kelompok tani secara tepat sasaran, guna membantu tani sehingga dapat membantu para petani guna meningkatkan sektor pertanian,” katanya.

Aviv pun mengapresiasi keberhasilan Polres Pandeglang membongkar kasus penyalahgunaan 25 ton pupuk bersubsidi beberapa waktu lalu. “Pupuk Indonesia mengapresiasi langkah aparat penegak hukum khususnya Kepolisian Republik Indonesia yang berhasil menangkap empat orang pelaku penyelewengan pupuk bersubsidi di Pandeglang, Banten,” ungkap Aviv.

Diketahui, Polres Pandeglang membongkar empat orang aktor utama penyalahgunaan pupuk bersubsidi di Pan-

Dari hlm 1

deglang. Polisi juga mengamankan 25 ton pupuk bersubsidi jenis Urea dan NPK Phonska.

Empat tersangka itu adalah AH (petani pekebun), JI (buruh harian lepas) HJ (wiraswasta), dan JP (wiraswasta) yang sama-sama warga Kabupaten Pandeglang. Polisi juga tengah memburu empat orang lainnya berisial Us (Garut) SO, AR dan HT.

Kapolres Pandeglang, AKBP Bely Warlansyah mengatakan, pupuk bersubsidi yang peruntukannya di Kabupaten Pandeglang, telah dijual dan dikirim pelaku ke kabupaten dan kota yang berbeda.

“Yakni di Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Jawa Tengah. Ke Kabupaten Garut dan Blora,” katanya, beberapa waktu lalu.


Selain itu, pupuk bersubsidi yang seharusnya dikirim kepada petani di wilayah Pandeglang, malah dikirim ke Kabupaten Garut dan Grobogan.

“Total penyalahgunaan tiga kejadian itu sebanyak 38 ton pupuk bersubsidi sudah dikirim ke luar daerah. Dan sebanyak 25 ton pengirimannya dapat digagalkan,” katanya.

Keempat tersangka dijerat dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan dan atau Pasal 6 ayat 1 huruf b dan/atau c Jo Pasal 1 sub 1e dan sub 3e Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi Jo Pasal 34 ayat (2) dan/atau ayat (3) Permendag RI Nomor 04 Tahun 2023 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Jo Pasal 4, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 14 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata cara Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian. “Dengan ancaman pidana di atas lima tahun dan denda Rp5 miliar,” katanya. (suf/nda)

Dokumentasi

**BIRO HUMAS DAN INFORMASI PUBLIK  
KEMANTAN**

Title	Ganggu Produksi Beras Hingga 1,2 Juta Ton	 Kementerian Pertanian
Date	4 Agustus 2023	
Media	Radar Banyumas	
Page	2	
Author	Jpc	



MEMANGGUL: Pekerja di gudang PT Food Station Tjipinang Jaya, Jakarta Timur.

JAWAPOS

## Ganggu Produksi Beras Hingga 1,2 Juta Ton

### Dampak El Nino di Indonesia

**JAKARTA** - Pemerintah berupaya memastikan ketersediaan beras dalam negeri. Selain fenomena El Nino bisa berdampak pada pasokan pangan, kebijakan India yang menghentikan ekspor beras turut diantisipasi. Kemarin (2/8) Presiden Joko Widodo menggelar rapat terbatas (ratas) dengan para menteri untuk membahas secara khusus persoalan tersebut.

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo menjelaskan, melalui rapat itu, presiden ingin mengecek ketersediaan dan keterjangkauan beras dalam negeri.

Dari data yang dimiliki

pemerintah, cadangan beras aman hingga Desember mendatang. Namun, Kementan kemudian melakukan kurasi dengan meneliti lebih lanjut. "Sampai September kita masih punya overstock 2,1 juta ton beras," katanya di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta.

Setiap bulan, kata dia, dari 800 ribu hektare sawah dapat menghasilkan 2 juta ton beras. Itu cukup untuk memenuhi konsumsi bulanan tanah air. Yang dikhawatirkan justru pada kurun Oktober hingga Desember. Menurut Syahrul, tiga bulan tersebut adalah masa-masa menanam. Jadi, cadangan beras bisa turun.

Fenomena El Nino membuat curah hujan sedikit dan

berisiko terjadi kekeringan. Kondisi itu tentu membuat produktivitas hasil pertanian menurun. "Kami akan siapkan 500 ribu hektare untuk antisipasi El Nino," ucapnya.

Berdasar perkiraan, dampak El Nino bisa mengurangi produksi beras 300 ribu ton sampai 1,2 juta ton. Kekurangan produksi itu akan disiasati Kementan. Menurut Syahrul, dalam kunjungannya ke beberapa daerah, pihaknya melihat kesiapan lahan untuk ditanami padi sebagai persediaan dampak El Nino.

Kepala Bulog Budi Waseso yang ditemui setelah ratas menyebutkan, pihaknya memiliki stok 1,3 juta ton beras. Untuk mencukupi pasokan, Bulog akan menda-

tangkan beras dari beberapa negara seperti Vietnam, Pakistan, dan Thailand. Lelang sudah dilakukan dan tinggal menunggu barang.

Di sisi lain, Suplai beras global terancam menyusul negara-negara penghasil membatasi, bahkan menghentikan eksportnya. Salah satunya, India. Sejak 20 Juli lalu, India melarang ekspor beras putih nonbasmati untuk menekan kenaikan harga beras domestik di dalam negeri.

Selama setahun terakhir, India telah bergulat dengan inflasi pangan. Harga beras dalam negeri meningkat lebih dari 30 persen sejak Oktober lalu. Itu mengakibatkan meningkatnya tekanan politik terhadap pemerintah menjelang pemilihan umum

tahun depan.


"Saya menduga bahwa tindakan untuk melarang ekspor beras nonbasmati, sebagian besar bersifat pencegahan dan mudah-mudahan ini hanya sementara," ujar Joseph Glauber dari Institut Riset Kebijakan Pangan Internasional (IFPRI).

India adalah pengeksport beras utama dunia. Tahun lalu mereka menyumbang sekitar 40 persen dari perdagangan global yang mencapai total 55,4 juta metrik ton.

Dari jumlah itu, sebanyak 22,2 juta metrik ton berasal dari India. Jauh lebih banyak dibandingkan pengiriman gabungan empat negara pengeksport utama lainnya, yaitu Thailand, Vietnam, Pakistan, dan AS. (jpc)

Dokumentasi

**BIRO HUMAS DAN INFORMASI PUBLIK  
KEMANTAN**

Title	Ombudsman RI Monitoring Proses Distribusi Pupuk Subsidi agar Tepat Sasaran	 Kementerian Pertanian
Date	4 Agustus 2023	
Media	Metropolitan Bogor	
Page	12 Part 1	
Author	Dev/b/eka/run	

**PERTANIAN**

# Ombudsman RI Monitoring Proses Distribusi Pupuk Subsidi agar Tepat Sasaran


**METROPOLITAN** - Workshop dengan tema 'Transformasi Kebijakan Subsidi Pupuk' dilaksanakan di Hotel Lorin Sentul, Sentul, Babakanmadang, Kabupaten Bogor, hingga berlangsung hingga 5 Agustus 2023 mendatang.

Dalam kegiatan itu, Wakil Ketua Ombudsman RI Bobby Hamzar Rafinus mengaku pihaknya melakukan pengawasan terkait proses distribusi pupuk subsidi yang diberikan kepada para petani oleh Kementerian Pertanian (Kementan) RI.

"Ombudsman juga telah memberikan input melalui kajian yang telah diikuti Kementerian Pertanian

**11**

**OMBUDSMAN** . Baca Hal

Title	Ombudsman RI Monitoring Proses Distribusi Pupuk Subsidi agar Tepat Sasaran	 Kementerian Pertanian
Date	4 Agustus 2023	
Media	Metropolitan Bogor	
Page	12 Part 2	
Author	Dev/b/eka/run	

# Ombudsman RI Monitoring Proses Distribusi Pupuk Subsidi agar Tepat Sasaran

■ Sambungan dari Hal 12

dan lembaga-lembaga terkait. Ombudsman dengan 34 perwakilan di tingkat provinsi akan terus melakukan pengawasan. Karena peredaran pupuk bersubsidi ini melibatkan berbagai pihak. Tidak hanya BUMN, tapi juga para masyarakat yang masuk lini perdagangan distribusinya," kata Bobby, Kamis (3/8).

Bobby menjelaskan

pengawasan tersebut bertujuan memastikan pupuk subsidi yang telah disediakan akan sampai kepada para petani sesuai data yang diberikan (tepat sasaran).

Selain itu, Bobby juga mengaku pihaknya memiliki wadah pengaduan untuk masyarakat, terkait pembagian pupuk subsidi dari pemerintah ditingkat kota/ kabupaten di seluruh Indonesia.

"Kami dalam beberapa kesempatan masih menerima

laporan dari masyarakat terkait kelangkaan yang terjadi. Melalui peredaran pupuk bersubsidi ini, mudah-mudahan kita akan terus mendapat data semakin akurat," ujarnya.

Sementara itu, anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Ftaika menyebut banyak sekali laporan yang masuk kepada pihaknya, namun terputus lantaran para pelapor merupakan petani.

"Yang melaporkan itu banyak,

tapi karena yang melaporkan itu para petani, yang di mana laporan secara persyaratan formil materilnya tidak bisa dipenuhi, jadi membuat kami harus aktif untuk melakukan investigasi tersebut," kata Hendra.

"Kami mencatat Kementerian Pertanian masih on the track berupaya melaksanakan kegiatan tindakan yang dimintai Ombudsman," tambahnya. (dev/b/eka/run)

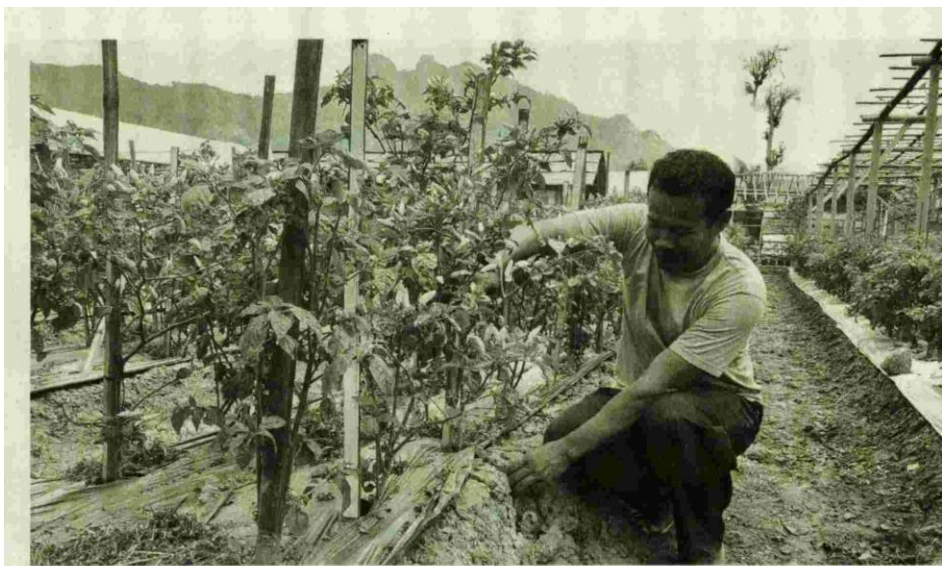
Dokumentasi

**BIRO HUMAS DAN INFORMASI PUBLIK  
KEMANTAN**

Title	Petani Diajak Garap Hortikultura
Date	4 Agustus 2023
Media	Solopos
Page	6
Author	Muhammad Diky Pradita



Kementerian Pertanian



Muhammad Diky Pradita

### Petani sekaligus

Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan Wonogiri, Dwi Sartono, memeriksa tanaman cabai di Kebun Barrotani Manunggal, Kecamatan Selogiri, Kabupaten Wonogiri, Kamis (3/8/2023).

ANTISIPASI DAMPAK EL NINO

# Petani Diajak Garap Hortikultura

MUHAMMAD DIKY PRADITIA

WONOGIRI—Pertanian hortikultura bisa menjadi opsi bagi petani dalam menghadapi fenomena El Nino yang mengakibatkan kemarau panjang di Kabupaten Wonogiri. Hal itu lantaran El Nino dinilai bakal berdampak pada kualitas dan kuantitas produksi pertanian pangan di Wonogiri.

Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Wonogiri, Dwi Sartono, mengatakan fenomena El Nino harus disadari betul petani di Wonogiri. El Nino berakibat kemarau panjang sehingga mengancam produktivitas pertanian di Wonogiri. Terutama pertanian pangan seperti padi yang banyak membutuhkan air.

Berdasarkan pengamatan dia, sekarang ini yang sudah masuk kemarau, banyak petani pangan yang membiarkan lahannya tidak produktif karena alasan sulit air. Padahal sebenarnya dengan kondisi seperti sekarang ini, lahan itu bisa dimanfaatkan untuk menanam tanaman hortikultura, misalnya cabai, bawang merah, atau sayur-sayuran lain.

"Tanaman hortikultura itu relatif tidak banyak membutuhkan air. Justru lebih mudah menanam hortikultura saat kemarau dibandingkan saat penghujan," kata Dwi saat ditemui *Espos* di Kebun Barrotani Manunggal, Selogiri, Kamis (3/8/2023).

Menurut Dwi, daripada sama sekali tidak memanfaatkan lahannya dalam kondisi seperti ini atau memanfaatkan

lahan tetapi dengan tanaman yang tidak banyak menguntungkan, lebih baik menanam hortikultura meski luasannya tidak banyak karena keterbatasan air. Petani pangan bisa memanfaatkan sebagian lahan pertanian yang tidak tergarap itu dengan menanam tanaman hortikultura. Hal itu dilakukan sembari belajar menanam jenis tanaman tersebut.

"Kenyataannya, di Wonogiri itu petani lebih banyak bergantung pada pertanian pangan. Dampaknya, ketika kondisi seperti ini, mereka mandek, tidak menanam. Makanya, kondisi ini justru bisa menjadi momen bagi mereka untuk belajar pertanian hortikultura, sembari memanfaatkan lahan yang tidak tergarap itu," ujar dia.

Lagi pula, lanjut Dwi, produk pertanian hortikultura memiliki pangsa pasar yang banyak. Hal itu bisa dilihat dari banyaknya pasokan produk-produk hortikultura yang didatangkan dari luar kota seperti Karanganyar dan Boyolali.

Selain mudah, Dwi menyebut menanam tanaman hortikultura juga terbilang murah tetapi menguntungkan jika dibandingkan dengan menanam tanaman pangan di luasan lahan yang sama. Dia mencontohkan salah satu tanaman hortikultura berupa bawang merah yang sedang ia tanam di lahan seluas sekitar 100 meter persegi.

Dengan luasan itu, Dwi menanam 10 kilogram (kg) bibit bawang merah. Setiap 1 kg bawang merah rata-rata bisa menghasilkan 15 kg bawang merah. Dengan begitu hasil panen diperkirakan mencapai 1,5 kuintal.

"Kalau kita tanam saat musim seperti ini, biasanya harganya per kilo bawang merah saat panen bisa mencapai Rp50.000. Kalau

dikalikan berarti dapatnya Rp7,5 juta. Atau taruhlah harganya normal, Rp30.000/kg maka bisa dapat Rp4,5 juta. Itu sudah untuk banyak dengan modal tidak lebih dari dua juta," jelas Dwi.

Dia berharap petani di Wonogiri bisa menyikapi kemarau panjang ini dengan perhitungan yang matang sehingga mereka tetap bisa mendapatkan penghasilan. Jangan sampai menyepikan informasi soal El Nino dan tidak melakukan langkah menghadapi fenomena itu untuk pertanian yang menjadi pemasukan.


Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian dan Pangan, Baroto Eko Pujanto, menyampaikan El Nino ini akan berdampak pada kualitas dan kuantitas pertanian di Wonogiri jika tidak dihadapi dengan langkah yang tepat oleh petani. Dia mengaku sudah menyiapkan beberapa untuk menghadapi fenomena itu, antara lain menginstruksikan seluruh Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) di masing-masing kecamatan untuk memberikan informasi soal terjadinya El Nino kepada petani melalui kelompok petani dan gabungan kelompok petani.

"Kami menganjurkan petani untuk memilih tanaman varietas genjah dan tahan kekeringan. Selain itu mengubah pola tanam menjadi palawija dan tanaman tahan kekurangan air seperti sorgum," kata Baroto kepada *Espos* di kompleks Sekretariat Daerah Wonogiri, Kamis siang.

Petani juga diharapkan meningkatkan pemanfaatan pupuk organik yang mampu menyimpan air lebih lama sembari tetap melakukan efisiensi penggunaan air irigasi. "Lahan yang jauh dari sumber irigasi diarahkan untuk bertanam palawija," ujar dia. 📍

Dokumentasi

BIRO HUMAS DAN INFORMASI PUBLIK  
KEMANTAN

Title	JUT Tingkatkan Hasil Pertanian Berorientasi Ekspor	 Kementerian Pertanian
Date	4 Agustus 2023	
Media	Neraca	
Page	11	
Author	Agus/gro	

# JUT Tingkatkan Hasil Pertanian Berorientasi Ekspor

## NERACA

Garut - Wakil Menteri Pertanian, Harvick Hasnul Qolbi mendorong komoditas pertanian Garut agar berorientasi ekspor, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat petani. Atas dasar itulah maka pemerintah melalui Kementerian Pertanian (Kementan) menyerahkan bantuan Jalan Usaha Tani (JUT) sepanjang 1,8 kilometer di Desa Cintanagara, Kecamatan Cigedug, Kabupaten Garut, Jawa Barat.

"Hari ini kita saksikan pemberian investasi berupa Jalan Usaha Tani. Tentu saja dengan adanya ini dapat meningkatkan hasil pertanian di Kabupaten Garut, sehingga dapat menggenjot ekspor," kata Harvick.

Apalagi, lanjut Harvick, Kementan telah mencairkan program Gerakan Tiga Kali Ekspor atau Gratieks yang dapat mengakselerasi ekspor pertanian, termasuk dari Garut.

Namun diharapkan agar indeks pertanaman atau produktivitas pertanian di Garut pun ditingkatkan. Hal ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pangan domestik terlebih dahulu serta sebagai upaya mewujudkan kedaulatan pangan nasional.

"Garut ini selain menjadi sentra jagung dan hor-

tikultura, potensi kopi Garut juga luar biasa. Ini harus kita dorong agar bisa berorientasi ekspor," kata Harvick.

Sementara itu, Bupati Garut, Rudy Gunawan mengatakan JUT merupakan program yang strategis untuk menggerakkan hasil-hasil produksi pertanian di wilayahnya. Selain itu, menurut Rudy, adanya JUT ini dapat mempermudah akses sarana dan prasarana pertanian untuk menuju lahan.

"Jadi ini adalah yang diharapkan oleh masyarakat Garut, selain dari APBD, sehingga dapat memperluas jaringan usaha tani kita," ungkap Rudy.

Alhasil, ekspor pertanian meningkat berkat beberapa bantuan yang digulirkan oleh pemerintah melalui beberapa Kementerian/Lembaga (K/L) baik ditingkat pusat ataupun daerah.

Bahkan Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan nilai ekspor pertanian pada bulan Mei 2023 atau month to month (MtoM) mengalami kenaikan sebesar 33,76 persen apabila dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Kenaikan ini melengkapi kenaikan ekspor secara keseluruhan yang mencapai USD 21,72 miliar.

Deputi Bidang Neraca dan Statistik pada BPS, Moh Edy Mahmud mengatakan bahwa sektor per-

tanian juga mengalami kenaikan secara year on year sebesar 32,38 persen apabila dibandingkan bulan yang sama di tahun 2022. Menurutnya, pertanian berada pada posisi ketiga dengan kenaikan ekspor terbesar pada bulan Mei ini setelah industri pengolahan dan tambang.

"Nilai ekspor kita untuk produk pertanian itu sebesar USD 0,39 miliar. Kemudian kalau kita bandingkan secara year on year ada dua sektor yang meningkat terutama sektor pertanian yang naik sebesar 32,38 persen jika dibandingkan bulan Mei yang sama di tahun lalu," ujar Edy.

Secara persentasi, komoditi nasional yang berhasil di jual ke luar negeri mencapai 93,94 persen. Sebagian besar berasal dari non migas, dimana produk pertanian, kehutanan dan perikanan naik 33,76 persen dibandingkan bulan april sebelumnya.

"Sementara migas justru turun -12,10 serta tambang dan lainnya juga turun sebesar -20,97," kata Edy.

Nilai ekspor Indonesia pada bulan Mei tahun ini mencapai 21,72 miliar USD atau naik sekitar 12,61 persen jika dibandingkan bulan sebelumnya. Migas Indonesia pada bulan yang sama di ekspor sebesar 1,32 miliar USD atau meningkat sekitar 4,48 persen jika


dibanding bulan sebelumnya. Sementara untuk non migas pada Mei 2023 nilainya sebesar 20,40 miliar USD atau naik sekitar 13,18 jika dibandingkan bulan sebelumnya.

Sebelumnya, Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemenag), Komjen Pol Toms Tohir pun mengungkapkan pertanian mampu menyumbang Rp2 triliun lebih terhadap perekonomian nasional.

"Sektor pertanian mampu memberikan kontribusi sebesar 2.428,9 triliun dari nilai total 19 ribu triliun. Ini merupakan sektor yang sangat penting sebagai sumber mata pencaharian 26,87 persen total angkatan kerja kita," ungkap Toms.

Toms juga mengatakan, saat ini sektor pertanian adalah sektor yang paling strategis karena juga berkontribusi pada ketersediaan pangan berkelanjutan. Tanpa pertanian, lanjut Toms, Indonesia akan dilanda kelaparan serta ancaman krisis lain yang bisa membahayakan keutuhan bangsa.

"Sektor pertanian berkontribusi besar dalam kesediaan pangan yang berkualitas. Tanpa pertanian yang produktif kita akan dilanda kelaparan dengan ancaman kelangkaan pangan akibat perubahan iklim atau cuaca ekstrem," kata Toms. ● agus/gro

Title	Mentan Ingin Implementasi Pupuk Subsidi Lebih Akurat	 Kementerian Pertanian
Date	4 Agustus 2023	
Media	Neraca	
Page	1	
Author	Mohar	

## UNTUK HADAPI EL NINO

# Mentan Ingin Implementasi Pupuk Subsidi Lebih Akurat

### NERACA

Kabupaten Bogor - Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo ingin implementasi program pupuk bersubsidi lebih akurat dan tepat sasaran dalam menghadapi dampak El Nino. "Masalah pupuk ini menjadi sangat penting karena ini berkaitan dengan produktivitas, terutama padi yang kita butuhkan, kita menghadapi climate change, hadapi El Nino, menghadapi krisis pangan dunia," ujar Mentan, usai workshop "Transformasi Kebijakan Pupuk Bersubsidi", di Babakanmadang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Kamis (3/8).

Menurut Mentan, sejumlah permasalahan pada implementasi program pupuk bersubsidi ini menjadi konsentrasi bagi Kementerian RI untuk segera dibenahi, sehingga programnya bisa berjalan lebih masif, tepat sasaran, dan akurat.

Syahrul menjelaskan, El Nino dipastikan berdampak pada sektor

pertanian, karena berkaitan dengan pengairan. "Bahkan ini bagian dari climate change dan El Nino yang berujung pada krisis pangan dunia," kata Syahrul.

Namun, kata dia lagi, hingga saat ini data Kementan RI menyatakan bahwa ketahanan pangan Indonesia dipastikan terjaga hingga Desember 2023. "Bulan ini saya masih panen 850 ribu hektare, bulan depan masih ada cadangan di atas 800 ribu hektare. Dan khusus untuk El Nino sesuai perintah Presiden, saya mempersiapkan 500 hektare untuk membooster kalau terjadi dampak dari produktivitas yang pasti menurun," katanya lagi.

Di samping itu, ia optimistis workshop yang digelar bersama Ombudsman RI dan PT Pupuk Indonesia dapat memperbaiki implementasi kebijakan pupuk bersubsidi menjadi lebih baik, cepat dan akurat. "Ini tentu kita berharap kita menemukan sistem yang lebih akurat. Dengan demikian dari

jauh-jauh hari kita sudah tahu seberapa besar orang-orang di setiap daerah yang harus tersentuh pupuk subsidi," ujarnya pula.

Dia mengingatkan, tidak semua petani berhak memperoleh pupuk bersubsidi, melainkan ada kriteria dan sejumlah persyaratan tertentu yang harus dipenuhi.

Sebelumnya diwartakan, Mentan Syahrul mengatakan Pemerintah menyiapkan 500 ribu hektar lahan pertanian untuk mengantisipasi dampak kemarau yang berkepanjangan akibat El Nino. "El Nino kekeringan, dan kekeringan bawa air terbatas, panas yang cukup membuat produktivitas pasti menurun. Kita akan siapkan 500 ribu hektar untuk antisipasi El Nino," kata Syahrul setelah rapat di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (2/8).

Syahrul mengatakan sejak peringatan El Nino muncul pada tahun ini, dirinya telah rutin melakukan inspeksi ke daerah dan memeriksa fasilitas penunjang pro-

duksi beras. Dia mengaku baru saja memeriksa sejumlah waduk dan bendungan di berbagai daerah dan mendapati data bahwa fungsi pengairan masih berjalan baik.

"Saya habis cek beberapa waduk dan dam kita yang besar ternyata airnya cukup, dan dam-dam besar itu bisa bertahan sampai enam bulan tanpa hujan pun," ujarnya seperti dikutip *Antara*.

Dia mengatakan telah aktif aktif berkoordinasi dengan kepala daerah guna mengantisipasi El Nino. Syahrul juga mengaku sudah memetakan dampak terburuk terhadap stok beras akibat El Nino di Indonesia pada Agustus-September 2023.

"Kemungkinan kekurangan produksi yang terimbas El Nino sekitar 300 ribu ton sampai 1,2 juta ton bisa kita siapkan. Saya baru pulang dari tujuh provinsi hari ini, dan tujuh provinsi menyatakan kesiapannya untuk lahan yang kita konsentrasikan kalau besok ada masalah tentang El Nino untuk ke-


pentingan nasional," ujarnya.

Syahrul mengatakan lahan produksi untuk mengantisipasi El Nino itu berada di Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan.

Kemudian, pemerintah juga menyiapkan wilayah penyangga untuk produksi di Kalimantan Selatan, Nusa Tenggara Barat, Banten, dan Lampung. Dengan begitu, Syahrul optimistis dapat mengendalikan dampak El Nino agar tidak mengganggu stok pangan nasional khususnya beras.

Hingga saat ini, menurut data Kementerian Pertanian, stok dan harga beras masih terjaga. Pemerintah hingga September 2023, ujar Syahrul, masih memiliki kelebihan stok 2,7 juta ton beras.

"Dari setiap bulan masih ada panen 800 ribu hektar itu menghasilkan cukup untuk kebutuhan kita setiap bulan sekitar 2 juta (ton)," ujarnya. @mohar

Title	Ombudsman Ungkap Lima Masalah dalam Kebijakan Pupuk Bersubsidi	 Kementerian Pertanian
Date	4 Agustus 2023	
Media	Neraca	
Page	6	
Author	Bari/ant	

## Ombudsman Ungkap Lima Masalah dalam Kebijakan Pupuk Bersubsidi

### NERACA

Bogor - Ombudsman RI menemukan sejumlah permasalahan dalam kebijakan program pupuk bersubsidi yang melibatkan Kementerian Pertanian (Kementan) dan PT Pupuk Indonesia. "Permasalahan pokok dalam kebijakan pupuk bersubsidi berdasarkan hasil kajian dan investigasi," kata Wakil Ketua Ombudsman RI Bobby Hamzar Rafinus saat memberi sambutan dalam workshop "Transformasi Kebijakan Pupuk Bersubsidi", di Babakanmadang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Kamis (2/8).

Ombudsman RI mencatat lima poin permasalahan pokok dalam kebijakan program pupuk bersubsidi. Pertama, yaitu mengenai tujuan kebijakan pupuk bersubsidi yang dinilai belum jelas dan tepat tujuan. Kedua, kata dia lagi, permasalahan kriteria petani penerima pupuk bersubsidi yang dinilai belum jelas dan tepat sasaran. Ketiga, pendataan yang tidak kunjung menghadirkan data yang akurat.


Keempat, permasalahan penyaluran yang kerap memunculkan isu tidak tepat sasaran, kurang dan langka. Kelima, permasalahan desain perencanaan anggaran yang tidak merata pada setiap dukungan program pupuk bersubsidi. Bobby mengatakan, Ombudsman RI memberikan perhatian secara khusus guna mendorong perbaikan dan transformasi dalam kebijakan pupuk bersubsidi, salah satunya melalui workshop tersebut.

"Hal ini dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan pemerintah terhadap publik di sektor pertanian," kata Bobby. Menurut dia, kegiatan workshop itu akan menjadi momentum yang penting bagi instansi-instansi yang terlibat untuk mendorong perbaikan dan transformasi kebijakan pupuk bersubsidi.

"Tentunya menjadi harapan bagi kita semua, semoga tata kelola pupuk bersubsidi semakin lebih baik ke depannya dan petani kecil di Indonesia mendapat perlindungan atas hak-haknya dalam memperoleh pupuk bersubsidi," ujarnya pula.

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo di tempat yang sama optimistis workshop yang digelar bersama Ombudsman dan PT Pupuk Indonesia dapat memperbaiki implementasi kebijakan pupuk bersubsidi menjadi lebih baik, cepat dan akurat.

"Ini tentu kita berharap menemukan sistem yang lebih akurat. Dengan demikian dari jauh-jauh hari kita sudah tahu seberapa besar orang-orang di setiap daerah yang harus tersentuh pupuk subsidi," ujar dia lagi. Dia mengingatkan, tidak semua petani berhak memperoleh pupuk bersubsidi, melainkan ada kriteria dan sejumlah persyaratan tertentu. ● bari/ant

Title	Pemkab Cianjur Pastikan Stok Pangan untuk Warga Aman	 Kementerian Pertanian
Date	4 Agustus 2023	
Media	Neraca	
Page	9	
Author	Ant	

## Pemkab Cianjur Pastikan Stok Pangan untuk Warga Aman

### NERACA

Cianjur - Pemerintah Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, memastikan stok pangan masih aman untuk memenuhi kebutuhan masyarakat setempat hingga lima bulan ke depan, meski dampak kekeringan diperkirakan melanda sebagian kecil wilayah Cianjur, namun antisipasi sudah dilakukan.

Bupati Cianjur, Herman Suherman di Cianjur Rabu (2/8), mengatakan bahwa fenomena El Nino dapat berdampak pada ketahanan pangan karena berpotensi menyebabkan kekeringan di sektor pertanian, namun sejak jauh hari sudah dilakukan antisipasi termasuk menyiapkan stok pangan lebih dari 5.000 ton.

"Harapan kami fenomena El Nino tidak membuat Cianjur mengalami kemarau panjang karena beberapa hari terakhir hujan masih terjadi di Kecamatan Cugenang dan Cipanas, sedangkan stok pangan yang dimiliki cukup sampai lima bulan ke depan," katanya.

Langkah antisipasi dilakukan dengan merawat sumber mata air yang ada termasuk daerah yang subur dengan air dari pegunungan seperti Kecamatan Cipanas yang merupakan kawasan agropolitan yang airnya terus mengalir.

Sejak jauh hari pihaknya sudah meminta aparat kecamatan dan desa untuk membangun embung dari Dana Desa dan Alokasi Dana Desa atau bantuan pemerintah lainnya, sehingga saat terjadi kemarau panjang warga tidak kesulitan mendapatkan air bersih.

"Untuk daerah yang masih hujan, diutamakan membuat biopori untuk penyimpanan air. Kami juga instruksikan camat dan kepala desa agar mengimbau warga berhati-hati karena saat musim kemarau rawan terjadi kebakaran," katanya.

Bupati Cianjur menambahkan untuk wilayah yang rawan terjadi kekeringan, pihaknya menyiapkan tangki air milik Perumdam Cianjur dan PMI Cianjur, untuk mendistribusikan air bersih untuk kebutuhan warga.

"Kalau air untuk kebutuhan rumah tangga akan dipasok dari tangki air Perumdam Cianjur dan PMI Cianjur, harapan kami kemarau panjang tidak terjadi namun kami sudah siap untuk mengantisipasi," katanya. ● ant